

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PEMBIAYAAN  
ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP  
PENINGKATAN UTANG NEGARA**

**SKRIPSI**

**BIMA ACHMAD SETIAWAN**  
**NIM. 0501161068**

**Program Studi :**  
**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PEMBIAYAAN  
ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP  
PENINGKATAN UTANG NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

**BIMA ACHMAD SETIAWAN**  
**NIM. 0501161068**

**Program Studi :**  
**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Achmad Setiawan

Nim : 0501161068

Tempat/tgl. Lahir : Binjai, 24 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Tandam Pasar 5 Jawa Jl. Melinjau Gg. Melinjau 5 Binjai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PENINGKATAN UTANG NEGARA**” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Desember 2020

Membuat pernyataan  
  
Bima Achmad Setiawan

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

### **ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PENINGKATAN UTANG NEGARA**

Oleh :

**Bima Achmad Setiawan**

**Nim. 0501161068**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Paada Program Studi Ekonomi Islam

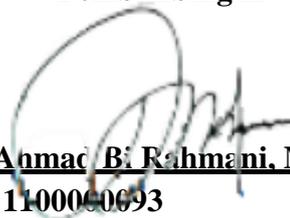
Medan, 14 Desember 2020

**Pembimbing I**



**Dr. Hj Yenni Samri Juliati Nst. MA**  
**NIP. 19790701 200912 2 003**

**Pembimbing II**



**Nur Anmac Bi Rahmani, M.Si**  
**NIB. 1100060693**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ekonomi Islam**



**Dr. Masliyah MA**  
**NIP. 19760126 200312 2 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PENINGKATAN UTANG NEGARA “ an. Bima Achmad Setiawan, NIM 0501161068 Prodi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 29 Januari 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,



Imsar, M.Si  
NIDN. 2003038701

Sekretaris,



Rahmat Daim Harahap, M. Ak  
NIDN. 0126099001

Anggota

Pembimbing I



Dr. Hj Yenni Samri Juliati Nst, MA  
NIP. 19790701 200912 2 003

Pembimbing II



Nur Ahmad Bi Rahmani, M.Si  
NIB. 1100000093

Penguji I



Imsar, M.Si  
NIDN. 2003038701

Penguji II



Rahmat Daim Harahap, M. Ak  
NIDN. 0126099001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN : 2023047602

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara**”. Atas nama Bima Achmad Setiawan. Dibawah bimbingan **Dr. H. Yenni Samri Juliati Nst, MA** sebagai Pembimbing I dan **Nur Ahmad Bi Ramani, M.Si** sebagai Pembimbing II

Setiap negara sudah pasti memiliki penerimaan negara melalui postur penerimaan pajak untuk anggaran belanja, namun setiap tahun nya penerimaan pajak belum bisa memenuhi anggaran belanja negara yang di mana jumlah pengeluaran negara selalu lebih besar dari pada penerimaannya sehingga selalu terjadi defisit anggaran sehingga pemerintah mengambil jalan melalui kebijakan pembiayaan anggaran yang di mana melakukan utang negara untuk memenuhi anggaran belanja negara sehingga negara tarus mengalami penambahan utang, namun dalam jangka panjang jika negara selalu melakukan kebijakan utang negara dan tidak di imbangi dengan pengoptimalan penerimaan pajak maka utang negara akan terus bertambah setiap tahunnya karena selalu mengandalkan utang negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak, pembiayaan anggaran dan belanja negara terhadap peningkatan utang negara periode 1990-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan time-series secara tahunan pada periode 1990-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan utang negara Indonesia, sedangkan pembiayaan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan utang negara Indonesia pada tahun 1990-2019. Adapun untuk belanja negara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan utang negara Indonesia

**Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran, Belanja Negara, Peningkatan Utang Negara**

## KATA PENGANTAR

### Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT sang pencipta alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk kepada setiap makhluk ciptanya, termasuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara terhadap Peningkatan Utang Negara”**. Salam dan shalawat diucapkan kepada Nabi Muhammad, sang pencerah yang menuntut umatnya dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan segala ilmu dan ajarannya.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi(S.E) pada Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, disamping memberikan pengalaman kepada penulis untuk meneliti dan menyusun karya ilmiah berupa skripsi.

Dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara materi atau moril. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. Syahrin Harahap, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Dekan Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universita Negeri Sumatera Utara, Dr. Andri Somitra, M.A
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Imsar, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Ibu Isnaini Harahap Selaku Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini

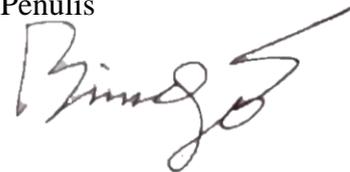
7. Bapak Nur Ahmad Bi Rahmani, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikkan arahan dan koreksi dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya ketika proses menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat saya Fathur, Riki dan Yuriska yang selalu membantu saya dan memberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Ekonomi Islam stambuk 2016 yang selama ini telah bersama menyelesaikan perkuliahan dan berjuang bersama untuk mendapatkan gelar dan juga terimakasih atas dukungan dan doanya dalam peroses penyelesaian skripsi ini.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membantu saya seklama proses pengerjaan skripsi ini, yang tidaak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada kata-kata selain kata terima kasih atas semua dukungan yang didapat, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua teman-teman dan sahabat yang membantu penulisan dan semoga yang di berikan menjadi amal kebaikan. Meskipun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti juga mengharapkan kritikan dan saran agara kedepannya membangun dan mejadikan acuan dalam perubahan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan Hidayahnya kepada kita semua Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 19 November 2020

Penulis



**Bima Achmad Setiawan**

Nim 0501161068

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Penelitian.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
A. Teori Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara.....	8
B. Utang Negara.....	9
1. Pengertian Utang Negara.....	9
2. Jenis-jenis Utang Negara.....	11
3. Fungsi Utang Negara.....	14
4. Pandangan Islam tentang Utang Negara.....	16
C. Penerimaan Pajak.....	19
1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	19
2. Pelaksanaan Ekstansifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak.....	21
3. Jenis-jenis Penerimaan Pajak.....	27

4. Manfaat Penerimaan Pajak.....	29
5 Fungsi Penerimaan Pajak.....	30
6. Pandangan Islam Tentang Penerimaan Pajak.....	34
D. Pembiayaan Anggaran.....	36
1. Pengertian Pembiayaan Anggaran.....	36
2. Jenis-jenis Pembiayaan Anggaran.....	38
E. Belanja Negara.....	40
1. Pengertian Belanja Negara.....	40
2. Jenis-jenis Belanja Negara.....	42
3. Fungsi Utang Negara.....	44
F. Penelitian Terdahulu.....	45
G. Kerangka Konseptual.....	47
H. Hipotesis.....	48
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Waktu Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	50
1.Subjek Penelitian.....	50
2. Objek Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Defenisi Variabel.....	52
1.Variael Independen.....	52
2. Variabel Dependen.....	53
3. Defenisi Operasional.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	55
1. Uji Asumsi Klasik.....	55
a. Uji Multikolinieritas.....	55
b. Uji Autokorelasi.....	55
c. Uji Heteroskedastisitas.....	56

d. Uji Normalitas.....	56
2. Uji Hipotesis.....	57
a. Analisis Regresi Linier.....	57
b. Uji t parsial.....	58
c. Uji F.....	58
d. Koefisien Determinasi.....	59
<b>BAB IV : TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A .Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	60
1. Kondisi Geografis .....	60
2. Kondisi Iklim Indonesia.....	61
3. Potensi Indonesia.....	61
B. Deskripsi Data Penelitian .....	65
1. Deskripsi Penerimaan Pajak.....	66
2. Deskripsi Belanja Negara.....	67
3. Deskripsi Pembiayaan Anggaran.....	69
4. Deskripsi Utang Negara.....	70
C. Uji Asumsi Klasik .....	72
1. Uji non-Multikolinearitas.....	73
2. Uji Non- Auto Korelasi.....	73
3. Uji Heteroskedesitas .....	74
4. Uji Normalitas .....	75
D. Uji Hipotesis.....	76
1. Koefisien Determinasi (Adjusted r Square).....	76
2. Uji F.....	77
3. Uji t.....	77

E. Pembahasan.....	75
1. Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Peningkatan Utang Negara .....	79
2. Pengaruh Pembiayaan Anggaran terhadap peningkatan Utang negara.....	79
3. Pengaruh Belanja Negara terhadap Peningkatan Utang negara.....	80
4. Pengaruh Penerimaan Pajak, Pambiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara.....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 Data Variabel Hitungan Miliaran Rupiah.....	2
2 Data Variabel Dalam Hitungan Triliun Rupiah.....	51
3 Indikator Variabel.....	53
4 Total Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Rupiah.....	66
5 Total Belanja Negara Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Rupiah.....	68
6 Total Pembiayaan Anggaran Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Rupiah.....	69
7 Total Utang Negara Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Rupiah	71
8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
9 Hasil Uji Autokorelasi.....	73
10 Hasil Uji Heteroskedesitas.....	74
11 Hasil Estimasi Regresi.....	76
12 Hasil Uji t .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Kerangka Konseptual.....	47
2	Peta Indonesia.....	60
3	Hasil Uji Normalitas.....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara pastinya memiliki penerimaan Negara yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran Negara atau anggaran belanja yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tentunya setiap Negara mengharapkan agar penerimaan Negara lebih besar dari pada pengeluarannya, walaupun dilapangan kita jumpai justru sebaliknya, yaitu pengeluaran belanja suatu Negara lebih besar dari pada penerimaannya. Indonesia adalah salah satu contoh Negara, dimana pengeluarannya lebih besar dari pada penerimaannya. Oleh karena itu, besarnya penerimaan suatu Negara selalu dioptimalkan agar dapat membiayai pengeluarannya bahkan utang Negara. Umumnya sumber penerimaan setiap Negara beragam asalnya seperti Penerimaan Pajak, Sektor Pariwisata, dan kegiatan Ekspor, salah satu sumber penerimaan Negara paling berkontribusi bagi Indonesia adalah Pajak. Pajak adalah iuran wajib yang bersifat wajib yang dibayarkan setiap warga Negara untuk kepentingan pembangunan.<sup>1</sup>

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.<sup>2</sup> Pendapatan Pajak dalam Negeri berasal dari PPh, Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar, namun pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak jumlah masih belum optimal hasil nya karena tidak selalu diimbangi dengan besarnya anggaran belanja negara yang meningkat di setiap tahunnya, penerimaan pajak yang menjadi andalan pendapatan negara diluar

---

<sup>1</sup><https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

minyak dan gas ternyata masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara sehingga pemerintah mencari solusi dengan mencari sumber pendanaan yang lain seperti Utang Luar Negeri untuk menutupi kekuangan.<sup>3</sup>

**Tabel 1. 1**

**Data Variabel Hitungan Miliaran Rupiah**

No	Tahun	Penerimaan Pajak	Pembiayaan Anggaran	Belanja Negara	Utang Negara
1	1990	22.011	-2.439	39.754	132.966
2	1991	24.919	1.999	44.581	148.834
3	1992	30.092	3.186	52.048	179.876
4	1993	36.665	1.720	57.833	169.887
5	1994	44.442	-3.811	62.607	210.370
6	1995	48.686	-5.998	65.342	282.881
7	1996	57.340	-4.057	82.221	301.447
8	1997	70.934	-2.809	109.302	732.746
9	1998	102.395	16.199	172.670	1.134.270
10	1999	125.952	44.060	231.878	1.056.937
11	2000	115.913	16.132	221.466	1.340.818
12	2001	185.541	40.485	341.563	1.349.823
13	2002	210.088	17.107	322.180	1.165.413
14	2003	242.048	35.109	376.505	1.177.270
15	2004	280.558	20.795	427.176	1.349.042
16	2005	347.031	8.872	757.649	1.342.050
17	2006	492.010	29.415	667.128	1.330.063
18	2007	409.203	42.456	509.632	1.430.965
19	2008	658.700	84.071	985.730	1.693.691
20	2009	619.922	112.583	937.382	1.681.708
21	2010	723.306	91.552	1.042.117	1.796.078
22	2011	873.873	130.948	1.294.999	1.947.373
23	2012	980.518	175.158	1.491.410	2.156.885
24	2013	1.077.306	237.394	1.650.563	2.652.099
25	2014	1.146.865	248.892	1.777.182	2.898.383
26	2015	1.240.418	323.108	1.806.515	3.493.530
27	2016	1.284.970	334.503	1.864.275	3.889.949
28	2017	1.343.529	366.623	2.007.351	4.407.053
29	2018	1.518.789	305.692	2.213.117	4.917.477
30	2019	1.546.141	402.051	2.309.287	5.340.221

Sumber : Nota Keuangan APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *APBN kita Kinerja dan Fakta*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, hal. 29-34.

Berdasarkan data utang negara yang di terbitkan di Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan selama 30 tahun terakhir pada tahun 1990 tercatat utang negara perdesember sejumlah Rp.132 Triliun dan terjadi kenaikan yang cukup drastis sampai Tahun 2019 yang tercatat sejumlah Rp.5.340 Triliun yang di terdapat dari LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ) sumber data yang memiliki data-data dari pemerintahan. Utang negara yang jumlahnya besar akan berdampak pada biaya untuk cicilan utang dan bunga akan semakin besar hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah agar kedepannya peningkatan utang negara tidak memberikan beban yang memberatkan keuangan atau APBN, kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan utang negara karena jika tidak dikelola dengan baik dalam melakukan utang untuk keperluan negara akan mengalami kebangkrutan seperti negara-negara buruk dalam pengelolaan yang buruk.<sup>5</sup>

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan tindakan utang terhadap luar negeri dikarenakan masih terjadi penerimaan pajak yang masih kecil dan pembiayaan anggaran dan belanja negara yang sangat besar yang mengharuskan pemerintah ketergantungan terhadap utang dikarenakan kebijakan fiskal yang membuat belanja negara menjadi besar dari pada penerimaan negara, dampak dari kebijakan anggaran yang ekspansif apabila pendapatan negara masih kecil dibandingkan dengan belanja negara maka di perlukan sumber pendanaan atau Utang untuk menutupi kekurangan anggaran negara tersebut, selain dari sisi penerimaan pajak dan belanja negara, peningkatan utang pemerintah juga dikarenakan oleh kebutuhan pembiayaan defisit besar, kebutuhan pembiayaan anggaran selain membiayai defisit anggaran juga digunakan untuk penyertaan modal negara pada BUMN, pembiayaan Proyek infrastruktur yang mengakibatkan kebutuhan pembiayaan anggaran yang besar dan menjadi alternatif pembiayaan anggaran juga meningkat pesat, utang negara memiliki risiko, apabila digunakan secara bijak dan tidak berlebihan, maka

---

<sup>4</sup><https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 59-63.

pemanfaatan utang negara menjadi meningkat, pertumbuhan pendapatan meningkat dan kesejahteraan.<sup>6</sup> Sebaliknya apabila digunakan dengan cara yang tidak baik dan berlebihan maka akan mengakibatkan hasil yang buruk dan akan mengalami kebangkrutan suatu negara seperti yang terjadi dibanyak negara berkembang yang berpendapatan rendah khususnya yang berada di afrika yang terperangkap dalam satu lingkaran yaitu lingkaran setan.<sup>7</sup> Maka sekarang pemerintah harus memikirkan solusi kedepannya untuk mencari jalan keluar permasalahan utang negara dan pemerintah harus bertindak dan mencari cara agar bagaimana penerimaan negara meningkat yaitu dengan cara memperbaiki penerimaan di sektor pajak karena pajak karena penerimaan negara yang terbanyak adalah pajak dengan cara melakukan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak.<sup>8</sup>

Menurut surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tanggal 11 Juli 2001, tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan yang dimaksud dengan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.<sup>9</sup>

Penelitian yang akan dilakukan kali ini merupakan melihat dari penelitian sebelumnya yang akan melibatkan salah satu komponen penerimaan negara yang terdiri dari pajak dan utang luar negeri, setelah kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi yang memiliki program peningkatan infrastruktur yang membuat pemerintah mengambil kebijakan pinjaman terhadap luar negeri atau Utang Luar

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2014, *Postur APBN Indonesia*, hal.59.

<sup>7</sup> Khairina Tambunan, *Diktat Ekonomi Pembangunan*, Repository.uinsu.ac.id. hal 60-61.

<sup>8</sup> Nurlathifah Rahmawati, 2009, *Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dengan Adanya Sunset Policy Serta Kontribusinya Dalam Perpajakan Di Kpp Pratama Karanganyar*, Program Studi Diploma Iii Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi, hal 52-54.

<sup>9</sup> Perpajakan.ddtc.co.id

negeri yang mengakibatkan pemerintah harus memiliki solusi agar utang negara tidak semakin membengkak di periode Pemerintahan selanjutnya dengan cara mengambil meningkatkan penerimaan negara melalui sektor Pajak.<sup>10</sup>

Saat ini Indonesia mendapatkan penerimaan terbanyak melalui Sektor Pajak. Sektor Pajak menjadi satu-satunya penerimaan negara paling besar 82,5 persen pada penerimaan pajak yang masuk dalam APBN dari total pendapatan negara. Namun disisi lain, hal tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan belanja negara dan pembiayaan anggaran sehingga tren menggunakan utang mulai menunjukkan jumlah peningkatan yang drastis di masa pemerintahan presiden Jokowi. Oleh sebab itu Indonesia juga harus menyeimbangkan kenaikan penerimaan salah satu nya di sektor Pajak.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait faktor penerimaan pajak dan peningkatan utang Negara. Oleh karena itu peneliti mengambil Judul. **“ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK, PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TERHADAP PENINGKATAN UTANG NEGARA ”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah yang meningkatkan penerimaan negara dengan berfokus pada sektor pajak
2. Potensi penerimaan negara dari sektor pajak masih belum bisa mengimbangi dengan peningkatan jumlah utang negara
3. Banyaknya sumber penerimaan negara namun hanya sektor pajak yang penerimaan terbanyak yang masuk anggaran Belanja negara
4. Penerimaan di Sektor pajak satu-satunya yang berpotensi sebagai penyelamat Indonesia dari utang negara.

---

<sup>10</sup> <https://tirto.id/kebijakan-infrastruktur-yang-lebih-baik-pasca-pemilu-2019-dj88>

<sup>11</sup> Pajak.co.id

### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis mengambil Penerimaan pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar dan menjadi penerimaan negara terbanyak yang berpengaruh terhadap kenaikan Utang Negara di Indonesia, dan Belanja Negara sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap kenaikan jumlah utang negara dikarenakan untuk pembiayaan anggaran dimana untuk batasan periode dibatasi dalam kurun waktu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Penerimaan Pajak berpengaruh Terhadap Peningkatan Utang Negara?
2. Apakah Pembiayaan Anggaran berpengaruh Terhadap Peningkatan Utang Negara?
3. Apakah Belanja Negara berpengaruh Terhadap Peningkatan Utang Negara?
4. Apakah penerimaan pajak, pembiayaan anggaran, belanja negara berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan Utang Negara ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Peningkatan Utang Negara
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Anggaran Terhadap Peningkatan Utang Negara
3. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara
4. Untuk mengetahui penerimaan pajak, pembiayaan anggaran, belanja negara, berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan utang negara.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Aspek Teoritis**

Setelah mengetahui analisis pengaruh penerimaan pajak, pembiayaan anggaran dan belanja negara terhadap peningkatan utang negara, maka di harapkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang konsep penerimaan pajak, belanja Negara dan Peningkatan utang negara serta mengetahui tentang pentingnya dari manfaat pajak, pembiayaan anggaran dan belanja negara beserta kegunaan utang negara bagi kepentingan negara.

### **2. Aspek Praktis**

Setelah mengetahui analisis pengaruh penerimaan pajak, pembiayaan anggaran dan belanja negara terhadap peningkatan utang negara menjadi dasar pemerintah untuk mengendalikan peningkatan utang negara dengan penerimaan pajak Indonesia dan benar-benar memanfaatkan anggaran belanja negara dengan baik agar kedepannya pembiayaan anggaran tidak mengalami devisa anggaran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran Dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara**

Menurut ekonom Ricardian pengurangan pajak tidak akan dianggapi konsumen dengan melakukan pengeluaran lebih banyak seperti yang dikemukakan ekonom tradisional. Ekuivalensi Ricardian (Ricardian equivalence), diambil dari nama ekonom terkenal abad kesembilan belas, David Ricardo.

Menurut Ricardo konsumen melihat ke depan dan karena itu, mendasarkan pengeluaran mereka tidak hanya pada pendapatan sekarang, tetapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Respon dari warga negara/konsumen yang melihat kedepan (sesuai asumsi Ricardian) terhadap dampak pengurangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: pemotongan pajak dan selanjutnya APBN didanai utang, tidak mempengaruhi konsumsi karena warga negara berfikir secara rasional dan jauh kedepan. Rumah tangga menabung kelebihan pendapatan disposabel untuk membayar kewajiban pajak masa depan yang ditunjukkan oleh pemotongan pajak. Karena itu, pengurangan pajak tidak memiliki dampak terhadap peningkatan konsumsi dan investasi secara langsung.<sup>1</sup>

Pembiayaan Anggaran berasal dari APBN yang digunakan untuk kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan pembiayaan anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan masih didominasi dengan dilakukannya pembiayaan utang karena lebih memadai daripada pembiayaan non utang sebab sering muncul pengeluaran kebutuhan dengan jumlah yang sangat besar untuk kegiatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/edukasi%20keuangan/edukasi%20keuangan%20xii-2012/html/files/assets/basic-html/page9.html>

<sup>2</sup> Fatturoyhan, Mufti Afif, 2017, *Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)*, Jurnal, hal. 1-3.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit anggaran pemerintah adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Hyman (2005) mendefinisikan defisit anggaran pemerintah adalah kelebihan pengeluaran pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, fee, dan pungutan retribusi yang diperoleh pemerintah. Besarnya defisit ditentukan dalam persentase terhadap produksi domestik bruto pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan menggunakan cara tersebut dapat diperoleh gambaran beban utang yang dimiliki pemerintah terhadap pendapatan nasional. Menurut PP No. 23 Tahun 2003 tersebut, anggaran pemerintah dapat defisit tidak melebihi 3% dari produksi domestik bruto (PDB).<sup>3</sup>

Menurut Wagner yang dikemukakan tentang Stephen 2016 tahun 1883 yang menyatakan bahwa belanja (Pengeluaran) pemerintah akan meningkat sejalan dengan pendapatan negara, sehingga belanja negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan utang negara, peningkatan belanja negara harus diimbangi dengan pendapatan yang diterima namun jika terjadi defisit utang menjadi solusi yang diperlukan untuk membiayai belanja negara karena semakin besar belanja suatu negara maka kebutuhan utang juga akan meningkat<sup>4</sup>

## **B. Utang Negara**

### **1. Pengertian Utang Negara**

Utang Negara (Inggris: *Sovereign debt*) adalah utang yang dijamin oleh pemerintah, sering disebut sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan uang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing (pemberi pinjaman). Obligasi adalah instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu (bisa selama sepuluh tahun atau satu tahun) dengan pokok utang ditambah bunga. Untuk membayar utang, pemerintah harus mengembalikannya dalam mata uang asing saat ia menjual obligasi.<sup>5</sup> Pengertian Utang Luar Negeri

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah, Nomor 23 Tahun 2003.

<sup>4</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner's\\_law](https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner's_law)

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Utang\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Utang_negara)

(Utang Negara ) Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Menteri negara/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan No. Kep- 031/KET/5/1995, pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>6</sup>Utang luar negeri dapat di telah dari berbagai aspek. Ditinjau dari aspek materil, utang merupakan arus modal masuk dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat menambah modal dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan perekonomian. Sedangkan berdasarkan aspek fungsinya, utang luar negeri merupakan salah satu *alternative* sumber pembiayaan Anggaran Belanja Negara yang diperlukan dalam pembangunan.

Di Indonesia Utang Luar Negeri (Utang Negara) disajikan dan dipublikasikan kepada rakyat dalam 3 bentuk sebagai berikut:

- a) Utang Luar Negeri (Utang Negara) Pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari 12 utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan diluar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah *Fixed Rate/ IFR*) dan Global Sukuk (Bank Indonesia, 2015).
- b) Utang Luar Negeri (Utang Negara) Bank Sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka

---

<sup>6</sup> Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995, Nomor KEP.031/KET/5/1995 Tahun 1995

mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menepatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

- c) Utang Luar Negeri (Utang Negara) Swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan bukan milik penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.<sup>7</sup>

## 2. Jenis-Jenis Utang Negara

Dalam guna memenuhi kebutuhan belanja negara yang terkadang membuat negara mengalami devisa anggaran, sehingga pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan utang, Indonesia memiliki utang negara yang terbagi dalam beberapa klasifikasi yaitu, utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri dapat dibedakan dalam berbagai aspek. Menurut Tribroto utang luar negeri dapat terbagi dalam 5 aspek yang mempengaruhi utang tersebut. Aspek – aspek ini didasari dalam bentuk, waktu, status penerimaan, sumber dana dan persyaratan peminjaman utang luar negeri.

- a) Jenis utang berdasarkan bentuk pinjaman, pinjaman dibagi atas:

---

<sup>7</sup> Nely Ayu Adriani Udhar, 2016, *Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, hal. 11.

- 1) Bantuan proyek, yaitu merupakan bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang dan jasa
  - 2) Bantuan teknik, yaitu merupakan pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli
  - 3) Bantuan program, yaitu merupakan bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan.
- b) Jenis utang berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas:
- 1) Pinjaman dari lembaga Internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti *World Bank* dan *Asian Development Bank*, yang pada dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan
  - 2) Serta pinjaman dari negara-negara anggota IGGI (*Intergovernmental Group on Indonesia*). Biasanya berupa pinjaman lunak.
- c) Jenis utang berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas:
- 1) Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan lima tahun
  - 2) Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5-15 tahun
  - 3) Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu di atas 15 tahun.
- d) Jenis utang berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas:
- 1) Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah
  - 2) Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta.
- e) Jenis utang berdasarkan berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman dibagi atas:
- 1) Pinjaman lunak, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun negara bilateral yang dananya berasal dari iuran

anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan.

- 2) Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian lagi komersial.
- 3) Pinjaman komersial yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.<sup>8</sup>

Utang Dalam Negeri adalah Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya (PP No.54 Tahun 2008). Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam struktur portofolio utang Pemerintah merupakan instrumen yang relatif baru. Pinjaman ini mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010, setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Meskipun PDN tersebut berasal dari bank-bank BUMN, namun tidak menutup kemungkinan bagi perbankan swasta untuk ikut terlibat dalam pengadaan PDN melalui sindikasi dengan bank bank BUMN. Sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam PP No. 54 tahun 2008 PDN lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh K/L, Pemda, BUMN atau BUMD. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan industri dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur, dan kegiatan investasi. Untuk saat ini penggunaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut masih terfokus pada kegiatan-kegiatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kementerian Pertahanan dan alat material khusus (almatsus) Polriyang diproduksi oleh produsen dalam negeri.

---

<sup>8</sup> Hanif Fadillah, 2018, *Analisis Hubungan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang*, Skripsi, institut Pertanian Bogor Fakultas Ekonomi dan Manajemen, hal.7.

### 3. Fungsi Utang Negara

Utang luar negeri walaupun kedengarannya menyakitkan karena kita harus bergantung pada negara lain, namun faktanya utang luar negeri merupakan kebijakan yang cukup penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan negara adi kuasa seperti Amerika Serikat juga tetap melakukan utang-piutang dengan negara lainnya. Sebut juga Negara Jepang, negara maju dari Asia ini juga masih mengeluarkan kebijakan pinjaman luar negeri untuk membangun negara dengan dana pinjaman.

Berikut ini manfaat utang luar negeri yang perlu kita ketahui;<sup>9</sup>

#### a) Pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang

Saat ini masyarakat memandang negatif terhadap utang negara. Akan tetapi dibalik utang itu ada tujuan yang dapat kita nikmati bersama nantinya. Pada negara berkembang, negara membutuhkan berbagai pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi seluruh rakyatnya. Sebagai kebijakan yang tepat, jalan pintas dan jalan tercepat bagi negara untuk segera membangun negaranya adalah dengan meminjam dana kepada negara tetangga yang memang memiliki dana yang cukup. Beberapa negara atau lembaga keuangan siap menyediakan pinjaman untuk suatu negara atau perorangan tentunya dengan bunga yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar yang ada.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut antara lain:

- 1) Pembangunan jalan (jalan tol, jalan layang).
- 2) Pembangunan sebuah kota.

#### b) Menutupi kekurangan anggaran

Adapun fungsi utang negara bisa untuk menutupi kekurangan anggaran seperti kas, bisa kas jangka pendek dalam belanja yang tidak dapat ditunda, solusi mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN tahun berikutnya. Kemudian ada juga yang menyebutkan

---

<sup>9</sup> <https://manfaat.co.id/manfaat-utang-luar-negeri>

utang negara ini dapat menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, tentunya jika dikelola dengan baik oleh yang bersangkutan.

**c) Utang luar negeri sama halnya seperti modal pembangunan**

Untuk dampak positifnya, negara dapat membangun infrastruktur dengan modal yang cepat. Uang yang negara pinjam akan digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas, dan subsidi dalam program pemerintah. Selain itu, uang yang didapat ini tidak sembarangan digunakan meski untuk kepentingan bangsa, dengan penggunaan yang sesuai dengan porsinya ini perlu di bagi rata agar semua program yang telah direncanakan berkembang meski sedikit demi sedikit. Kemudian, karena tidak seenaknya negara membuat uangnya sendiri, maka semua ada peraturan dan kesepakatannya.

Utang luar negeri juga bertindak sebagai:

- 1) Dapat meningkatkan kegiatan investasi agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi.
- 2) Sebagai alat untuk meratakan pendapatan negara sehingga rakyat lebih sejahtera.
- 3) Dapat menutupi kekurangan untuk belanja negara.

**d) Menjalinkan hubungan bilateral**

Utang luar negeri dapat membantu merekatkan hubungan dari kedua negara. Indonesia yang berhutang dengan negara lain ataupun dengan lembaga keuangan internasional, dapat membuat hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara lain agar dapat memiliki hubungan yang lebih baik. Kondisi ini cukup baik, karena di era modern ini setiap negara tentu bergantung dengan negara lain satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.

**e) Sebagai bentuk pengakuan negara lain**

Mendapatkan pinjaman luar negeri dari negara lain tidaklah mudah. Kita perlu meyakinkan bahwa kita memiliki sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman beserta

bunganya dengan pasti. Kesepakatan pemberian pinjaman dari luar negeri menunjukkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang akan terus bisa tumbuh dari waktu ke waktu.

#### 4. Pandangan Islam Tentang Utang Negara

Secara umum terdapat dua pandangan tentang utang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran negara. Pandangan pertama menganggap bahwa *external financing* merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. Pandangan yang kedua menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari utang luar negeri sebagai penutup *saving gap*-nya.<sup>10</sup> Pandangan pertama ini pada dasarnya membolehkan adanya *budgeted deficit* yang ditutup dengan *external financing*, sepanjang bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan syariah. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk *external financing* dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* daripada *flow creating debt*, dimana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

*Islamic Development Bank* (IDB) telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam dengan skema ini. Dibandingkan dengan utang, penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (*loss-profit sharing*). Pandangan kedua, melarang negara Islam untuk menutup *budgeted deficit* dengan hutang luar negeri, pandangan ini sebenarnya lebih dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif, dimana keterlibatan

---

<sup>10</sup>Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 237-238.

negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, dan berapapun besar-tinggi/berlipat-lipat/atau rendah) dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh agama dengan tegas, pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki hutang luar negeri. Dalam fakta, bunga utang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi negara-negara debitur, sejarah perekonomian pada masa Rasulullah Saw menunjukkan bahwa defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat penaklukan Makkah (*Fathu al-Makkah*), tetapi segera dilunasi pada periode perang Hunain. Kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian diikuti oleh khulafaurrasyidin pada masa berikutnya. Pertimbangan utama keseimbangan anggaran saat itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam.

Dari perspektif Islam, praktek dan proses serta implikasi dari utang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidak-sesuaian ini bisa dilihat dari berbagai hal:

- a) Utang yang didasarkan riba. Bunga mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya bunga.
- b) Utang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas baik secara individu maupun bangsa. Di sini terlihat sekal bagaimana Indonesia telah didikte, dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya ketika berhadapan dengan IMF.
- c) Utang luar negeri melanggar prinsip *fair dealing* dalam Islam. Dilihat dari proses yang diutarakan terdahulu, tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberian hutang. Tawar-menawar yang terjadi sangat

bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.<sup>11</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara donor yang cenderung lebih menguntungkan mereka. Unsur kerelaan yang harusnya diterapkan pada kedua belah pihak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan melihat kebutuhan yang mendesak dari debitur. Perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat memenuhi kualitas yang ditentukan agama sehingga berdampak hukum dan cenderung tidak dapat dibenarkan (aqad bathil). Nilai manfaat yang akan diterima negara debitur tidak sebanding dengan beban pinjaman itu sendiri sehingga hanya dapat digunakan untuk sementara waktu. Kelemahan negara debitur justru dimanfaatkan secara optimal oleh negara donor untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tidak adanya perimbangan tersebut tetap membuka peluang ketidakadilan serta kesenjangan ekonomi, sosial yang tidak dapat diselesaikan dengan pinjaman itu sendiri, tindakan yang tidak fair negara debitur, pengawasan yang lemah membuka peluang pemborosan dan tindak korupsi. Seluruh aktifitas negara debitur tidak dapat dijadikan usaha sehingga sangat merugikan pengusaha menengah ke bawah yang terkena dampak dari kebijakan itu, konsep *barakah* yang sangat kental dan merupakan aset moral paling berharga dari kalangan muslim tidak dapat terwujud bahkan cenderung digantikan dengan sistem pencapaian kepuasan maksimal dalam ekonomi.<sup>12</sup>

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana hal ini bisa diselesaikan. Memang, pembentukan kapital sangat dibutuhkan bagi setiap negara, namun cara yang ditempuh bukan dengan pelibatan birokrasi. Birokrasi cenderung membiaskan skala prioritas masyarakat. Langkah-langkah yang diambil sering mengesampingkan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, dan lebih mementingkan implikasi politik yang menguntungkan melalui suatu

---

<sup>11</sup> Munrokhim Misanam, *Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 th. 2000, hal.5-6.

<sup>12</sup> Syafiq Mahmadah Hanafi, *Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis*, Jurnal Asy- Syir'ah No. 7 Th. 2000, hal. 45.

kebijakan yang diciptakan. Apalagi jika birokrasinya memang korup, pertimbangan kebijakan yang diambil dapat dipastikan lebih mementingkan kepentingan finansial bagi pengambil keputusan, oleh karena itu dituntut mencari alternatif bagi pembentukan modal dengan berdasarkan filosofi bahwa swasta lebih mengetahui skala prioritas dari proyek yang akan dilaksanakan, sehingga setiap proyek yang dilaksanakan selalu bersifat *income generating*, misalnya dengan mengundang investor asing (*Foreign Direct Investment*). Di samping itu, pemerintah perlu membuat *framework* agar *strategic partnership* antara investor asing dengan investor lokal. Dengan cara ini pihak swasta diberikan kebebasan menentukan sendiri kebutuhan modal dan alternatif pemenuhan sambutan pemerintah cukup memberikan supervisi yang diperlukan. Memang tidak bisa mengandalkan perbaikan kesejahteraan dengan menyandarkan pada usaha swasta karena keterbatasannya melakukan investasi untuk pengadaan *public good*, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

## C. Penerimaan Pajak

### 1. Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut tax (Inggris); import contribution, taxe, droit (Prancis); steuer, abgabe, gebuhr (Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol), dan belasting (Belanda). Dalam literatur Amerika, selain istilah tax, dikenal pula istilah tarif.<sup>13</sup> Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>14</sup> Pajak juga dikenakan atas penjualan produk untuk keseimbangan pasar, pemerintah mengenakan pajak untuk jumlah yang di

---

<sup>13</sup> Mas Rasmini, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Modul, hal.3.

<sup>14</sup> Juliana Nasution, *Ekonomi Publik*, (Sumber : Repository.uinsu.ac.id), hal 21.

minta atas barang tersebut.<sup>15</sup> Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

Penerimaan pajak salah satu faktor pendukung pendapatan Nasional yang merupakan tolak ukur yang sangat penting dalam teori ekonomi makro karena memiliki peranan penting bagi suatu negara karena jika suatu negara memiliki pendapatan nasional yang baik maka suatu negara akan sejahtera ini sejalan dengan dilakukannya penerimaan pajak yang baik karena semakin tinggi pendapatan nasional maka akan dikatakan juga tinggi kesejahteraannya.<sup>18</sup>

Secara definisi, Pajak memiliki pengertian seperti terlihat pada kutipan pasal-pasal berikut ini:

- a) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007).
- b) Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh

---

<sup>15</sup> Imsar, *Ekonomi Mikro Islam*, (sumber: <http://repository.uinsu.ac.id/1311/1/Diktat%201imsar.pdf>), hal. 42.

<sup>16</sup> Irlan Fery Idris, 2015, *Pengantar Perpajakan Dengan Teori dan Kasus*, Grasindo, Jakarta, hal. 34.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>18</sup> Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Repository.uinsu.ac.id. hal. 34.

Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 10 UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara
- 2) Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah) berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk pembiayaan *public investment*, sehingga tujuan yang utama dari panungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara.
- 5) Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.<sup>19</sup>

## **2. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi pajak**

Dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan

---

<sup>19</sup> Mirna Tanjung, 2003, *Buku Ajar Perpajakan*, Univ Negeri Padang, Padang, hal. 1-2.

intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada angka.<sup>20</sup>

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

- a) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b) Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- c) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
- d) Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup><https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-06pj-92001>

- e) Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 diatas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP)
- b) KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini
- c) KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.
- d) KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak
- e) KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dimaksud pada huruf b dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.1 (untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman) dan Lampiran II.2 (untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini.
- f) Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban Wajib Pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan Wajib Pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, formulir

SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edaran ini)

- g) Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak
- h) Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing sebagai berikut :
  - 1) Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih
  - 2) Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp.300.000,- atau lebih
  - 3) Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih
  - 4) Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai jual Objek pajak (NJOP) Rp.1.000.000.000.- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP.
  - 5) Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000.- atau lebih.

Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak, Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

- a) Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :
  - 1) Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP.
  - 2) Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima.
  - 3) Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP.

- 4) Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP.
  - 5) Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau
  - 6) Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos).
- b) Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.
- c) Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam penjelasan b sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada penjelasan ke dua bagian a dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam penjelasan b sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada penjelasan ke 2 bagian a , oleh Seksi PDI data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
- e) Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam penjelasan bagian b sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada penjelasan ke 3 dan 6 bagian a , dilakukan PSL.
- f) Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam bagian b, sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada penjelasan ke 4 dan 5 bagian a , dilakukan pencocokan dengan data MFL.
- g) Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud ”KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran ini” dengan membubuhkan catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan.

h) Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL.

i) Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

Pelaksanaan Intensifikasi pajak, kegiatan intensifikasi pajak dan atau pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan)

2) Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).

b) Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.

c) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar

angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usahanya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib Pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

- d) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.
- e) Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.<sup>21</sup>

### 3. Jenis-Jenis Penerimaan Pajak

Adapun Beberapa jenis-jenis pajak yang di kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

#### a) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak ajak langsung.

##### 1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

##### 2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

---

<sup>21</sup> <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=1867>

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.<sup>22</sup>

#### b) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

##### 1) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan motor, serta pajak pengembalian dan pemanfaatan dir bawah tana dan air permukaan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

##### 2) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.<sup>24</sup>

#### c) Jenis Pajak Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

---

<sup>22</sup> Cermati.com, 2020, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>,

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 26.

<sup>24</sup> Ika Widiyanti, 2000, *Administrasi Pajak*, Sinar Mandiri, Jakarta, hal.9.

#### 1) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

#### 2) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.<sup>25</sup> Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

### 4. Manfaat Penerimaan Pajak

Uang pajak yang masuk ke Kas Negara/APBN/APBD adalah perwujudan gotong-royong untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik yang membayar atau yang tidak membayar pajak (manfaat perpajakan antara lain Infrastruktur, jalan, jembatan, pelayanan, dan pelayanan umum. Bermanfaat bagi yang membayar ataupun yang tidak membayar pajak). Salah satu hak rakyat adalah mengetahui mulai dari pembahasan anggaran di DPR/DPRD harus terbuka sampai dengan penggunaan uang pajak di APBN/APBD dalam setiap proyek pembangunan. Uang pajak di APBN/APBD adalah uang yang berasal dari rakyat jadi harus dimanfaatkan untuk fasilitas rakyat, dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP, yaitu : “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Isroah, 2013, Perpajakan, *Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU) Universitas Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta, h al 10.

<sup>26</sup>Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, 2018, *Perpajakan Dan Retribusi*, CV MEGA RANCAGE, Jakarta, hal 36.

## 5. Fungsi Penerimaan Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Umumnya dikenal dengan 3 (tiga) macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair, fungsi regulierend dan fungsi sosial.

### a) Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.<sup>27</sup>

Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk pengumpulan dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai penerimaan terbanyak, karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak. Jadi pajak memang merupakan tujuan untuk penerimaan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Kalau negara memerlukan uang maka negara mengajukan usul, dalam hal ini negara diwakili oleh Menteri Keuangan, karena masalah keuangan di bawah kekuasaan Menteri Keuangan. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa keuangan negara itu sifatnya berbeda dengan keuangan keluarga. Dalam keuangan keluarga, ada pepatah Belanda yang mengatakan “*De Tering*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.20.

*Naar De Nering Zetten*” maksudnya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan penerimaan.

Sementara dalam keuangan negara sifatnya lain lagi. Negara membuat perencanaan, berupa jumlah uang yang diperlukan, kemudian negara mencari uang yang diperlukan itu. Dalam hal keuangan negara terdapat pepatah Belanda yang merupakan kebalikan dari keuangan keluarga, yaitu “*De Nering Naar De Terring Zetten*”, maksudnya bahwa masalah keuangan direncanakan lebih dahulu, baru kemudian dicari sumbernya. Kalau suatu negara menghadapi kekurangan budget (keuangan), negara tersebut harus mencari uang menutup kekurangannya, tetapi tidak harus selalu dengan mencari utang.

Kekurangan keuangan negara ini hanya sekali-kali bisa ditutup dengan utang, tetapi kalau setiap kali mengalami suatu defisit, tidak mungkin setiap kali negara mengadakan utang.

Ada kalanya terdapat kesalahan pada pemerintah kita, seperti dahulu ketika keuangan negara mengalami defisit, lalu pemerintah menciptakan uang begitu saja, Akibatnya, rakyat menderita karena inflasi, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu sangat dirasakan ketika gaji tidak naik, sedangkan daya belinya semakin merosot/kurang. Jadi, hendaknya negara membuat suatu rencana anggaran yang sesuai antara penerimaan dengan pengeluaran, apalagi jika penerimaannya lebih besar daripada pengeluarannya.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri atas anggaran pendapatan dan anggaran belanja/pengeluaran. Sementara anggaran belanja/pengeluaran terdiri atas belanja/pengeluaran rutin dan belanja/pengeluaran pembangunan. Anggaran pendapatan itulah yang sebagian diperoleh dari penerimaan pajak. Dari pendapatan yang masuk, pertama-tama digunakan untuk belanja rutin, misalnya untuk membayar pegawai, sekolahan, keamanan, dan sebagainya. Kalau ada sisa yang disebut surplus, maka itulah yang digunakan untuk pembangunan. Untuk itu, dalam menyusun APBN harus pandai memperhitungkan bagaimana

anggaran belanja rutin dan pembangunan bisa sama dengan pendapatan negara itu, kalau ada kekurangan, itu merupakan masalah Menteri Keuangan agar mencari sumber pendapatan yang lain.<sup>28</sup>

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Mengatur *regulerend* pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.

Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena itu, kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan berupa beberapa hal berikut:

- 1) Pemberian pembebasan pajak (*tax holiday*) dan keringanan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia Bagian Timur.
- 2) Pembagian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah sehingga hasrat para ilmuwan untuk menerbitkan buku lebih besar dari pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional sehingga kesenian tradisional dapat hidup berdampingan dengan kesenian lain. Padahal, selama ini pertunjukan kesenian tradisional sudah banyak yang gulung tikar.

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir, 2005, *Ruang Lingkup Perpajakan Dan Kapita Selekta Perpajakan Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hal. 47-48.

- 4) Pemberian kompensasi-kompensasi pajak terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan terhadap pajak penghasilannya untuk jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih produktif sehingga di masa berikutnya akan dapat dikenakan pajak. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah.

Tindakan pemerintah yang demikian ini dapat dinamakan des incentive tax, antara lain berupa beberapa tindakan berikut:

2. Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri.
3. Pemberian hambatan-hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman keras dan pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras.<sup>29</sup>

c) Fungsi Sosial

Maksudnya, hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.

Fungsi sosial ini bagian dari fungsi lainnya (fungsi mengatur), jadi fungsi ini harus:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 51-52.

- 1) Memberikan pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk minimum kehidupan;
- 2) Memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan, dan lain-lain.<sup>30</sup>

## 6. Pandangan Islam Tentang Penerimaan Pajak

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab di sebut dengan *dhoribah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Dharabah adalah bentuk kata kerja (fi'il) sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *Dhoribatun* yang dapat berarti beban. Ia di sebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan di rasakan sebagai sebuah beban. Pada hakikatnya umat islam hanya di wajibkan untuk membayar zakat setiap tahunnya. Fungsi zakat dalam islam juga di gunakan untuk kemaslahatan umat dan pembangunan sebuah daerah. Namun dalam kasus di Indonesia tentu uang dari zakat saja di rasa kurang untuk menutupi kebutuhan operasional negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah menutunkan pajak sebagai sumber pendanaan negara agar proses perjalannya negara dapat seimbang.

Namun kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mengerti batas pemahaman yang jelas terkait perpajakan sesuai dengan pandangan islam, sehingga segala sesuatu yang di keluarkan atau di bayarkan oleh seorang muslim ini memang benar untuk jalan yang di berkahi Allah SWT. Bagi petugas zakat (amil), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas perintahnya dari Allah SWT, sehingga keseluruhan amal perbuatan yang mereka lakukan adalah bernilai kebaikan di sisi Allah SWT. Hal serupa harus di penuhi oleh petugas pajak (fiskus) harus memiliki alasan yang kuat sesuai dengan syariat islam, agar segala perbuatan yang di lakukan oleh fiskus dan wajib pajak bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 52.

Dalam al-Quran kata pajak hanya di sebutkan satu kali saja yakni pada QS At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang di haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tida beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang di berikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizrh (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS At Taubah 29)*

Pada ayat tersebut kata “jizyah” di terjemahkan dengan “pajak” , misalnya terdapat dalam kitab Al-Quran dan Terjemahannya oleh Departemen agama RI terbitan PT Syammil Bandung. Walaupun demikian tidak semua kitab Al-Quran mencetak kata *jizyah* dengan sebutan pajak. Untuk urusan penerjemahan yang paling benar adlah dengan menggunakan *jizyah* tetap sebagai *jizyah* atau sebagai upeti, hal ini di karenakan paak lebih teoat dengan sebutan *Dharibah*. Defenisi pajak menurut Abdul Qadim Aallum, menyebutkan bahwa pajak adalah harta yang di wajibkan oleh Allah SWT pada prang-orang muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang di wajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.<sup>31</sup>.

Dalam defenisi tersebut terdapat terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu:

<sup>31</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011) hal.28-29.

- a) Diwajibkan oleh Allah SWT
- b) Objeknya adalah harta
- c) Subjeknya kaum muslimin yang kaya (*ghanniyah*), tidak termasuk non muslim.
- d) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
- e) Di berlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera di atasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memenuhi empat unsur di antaranya:

- a) Harus adanya Nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non-muslim.
- c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan harta saja yang memikul beban utama.
- d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

## **D. Pembiayaan Anggaran**

### **1. Pengertian Pembiayaan Anggaran**

Pembiayaan anggaran utamanya digunakan untuk menutup anggaran akibat pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja Negara. Kebijakan defisit anggaran ditempuh dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.<sup>32</sup>

Selain itu, pembiayaan anggaran juga diperlukan dalam rangka:

- a) Memenuhi kewajiban Pemerintah, utamanya untuk pembayaran cicilan pokok (amortisasi) utang luar negeri dan dalam negeri, pembayaran

---

<sup>32</sup> Direktorat Penyusun APBN, Direktorat Jendral Anggaran, 2014, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*, Jakarta, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, hal.275.

jatuh tempo pokok utang, serta pembelian kembali (*buy back*) surat berharga negara,

- b) Membiayai pengeluaran pembiayaan utamanya untuk Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, penerusan pinjaman, dan lain-lain).

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun Anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, secara umum kebijakan pembiayaan anggaran telah dibatasi oleh peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai penjelasan pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Pembatasan defisit tersebut juga disebutkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pasal 83 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD.
- b) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan. Mengenai batasan jumlah pinjaman, menurut pasal 49 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003, dinyatakan bahwa jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam hal anggaran diperkirakan defisit, maka Pemerintah dapat menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang APBN. Sebaliknya, dalam hal anggaran

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat juga mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## **2. Jenis-jenis Pembiayaan Anggaran**

Pembiayaan anggaran dapat dirinci berdasarkan sumber dana, struktur pembiayaan anggaran. Sehingga pembiayaan anggaran dapat disajikan dalam tiga macam yang jumlah totalnya sama. Ketiga klasifikasi dimaksud yaitu:

- a) Pembiayaan anggaran dirinci menurut asal sumber pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.

Pembiayaan anggaran dalam dan luar negeri merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumber-sumber pembiayaan baik sumber pembiayaan dalam negeri maupun sumber pembiayaan luar negeri dan berdasarkan klasifikasi menurut GFS Manual tahun 2001. Pembiayaan dalam negeri bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Pembiayaan perbankan dalam negeri bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian *Subsidairy Loan Agreement* (SLA)/Rekening Dana Investasi (RDI), rekening pembangunan hutan dan rekening Pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri bersumber dari privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset (HPA), penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) penarikan pinjaman dalam negeri, dana investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), dan dana pengembangan pendidikan nasional. Sementara itu, pembiayaan luar negeri bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

- b) Pembiayaan anggaran dirinci menurut jenis sumber pembiayaan, yaitu pembiayaan anggaran yang sumber dananya berasal dari utang dan non utang .

Pembiayaan anggaran utang dan nonutang merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumber-sumber

pembiayaan yang diperoleh melalui penerbitan utang dan pembiayaan nonutang. Pembiayaan anggaran utang terdiri dari Surat Berharga Negara (neto), pembiayaan luar negeri (neto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Sementara itu untuk pembiayaan nonutang bersumber dari perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri. Sumber pembiayaan perbankan dalam negeri meliputi penerimaan cicilan pengembalian SLA (RDI), SAL, Rekening Kas Umum Negara (RKUN), rekening pembangunan hutan, rekening cadangan reboisasi, dan rekening Pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri meliputi privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset (HPA), dana investasi Pemerintah dan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban penjaminan.

- c) Pembiayaan anggaran dirinci menurut jenis arus kas, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan karakteristik cash inflow (penerimaan pembiayaan) dan cash *outflow* (pengeluaran pembiayaan). Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan nonutang dan penerimaan pembiayaan utang. Penerimaan pembiayaan nonutang bersumber dari penerimaan cicilan pengembalian SLA (RDI), SAL, Rekening Kas Umum Negara (RKUN), Rekening Pembangunan Hutan (RPH), rekening cadangan reboisasi, rekening Pemerintah lainnya, privatisasi, dan HPA. Sedangkan penerimaan pembiayaan utang bersumber dari SBN (neto), penarikan pinjaman luar negeri (bruto), dan pinjaman dalam negeri (neto). Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pengeluaran utang dan pengeluaran nonutang. Pengeluaran pembiayaan nonutang digunakan untuk dana investasi Pemerintah dan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, pinjaman kepada PT. PLN dan kewajiban

penjaminan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan utang meliputi penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.<sup>34</sup>

## **E. Belanja Negara**

### **1. Pengertian Belanja Negara**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sehingga anggaran belanja merupakan rencana keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan keuangan negara.

Teori Pengeluaran Negara menurut para ahli sebagai berikut :

#### a) Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial.<sup>35</sup>

#### b) Wagner

Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi,

---

<sup>34</sup> Zunaidi Dkk, 2017, *Pembiayaan Anggaran : Bukan Sekadar Definisi Dan Utang*, Jakarta, Direktorat Jenderal Anggaran, hal.8.

<sup>35</sup> <http://redballeralfurqon.blogspot.com/2012/02/pengeluaran-negara.html>

menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain.<sup>36</sup>

c) Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat, dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut, dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.<sup>37</sup>

Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai, setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara

---

<sup>36</sup> <https://pamadiseme.wordpress.com/2011/10/28/teori-pengeluaran-negara/>

<sup>37</sup> <https://abstraksiekonomi.blogspot.com/2015/10/teori-peacok-dan-wiseman.html>

sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang.

## **2. Jenis-jenis Belanja Negara**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Sementara Pasal 15 ayat (5) menyatakan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR memuat perincian sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Sejak tahun 2005, pemerintah melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara melakukan perubahan format baru belanja negara guna mewujudkan format belanja negara yang lebih transparan dan tidak tumpang tindih, yaitu dengan membagi klasifikasi sebagai berikut:

- b) Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi, merupakan klasifikasi belanja yang didasarkan susunan kementerian negara/lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak bersifat permanen (d disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada).
- c) Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) mengatur klasifikasi belanja berdasarkan fungsi menjadi sebelas fungsi utama yaitu : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.
- d) Klasifikasi belanja berdasarkan sub fungsi, merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang disesuaikan dengan tugas masing-masing kementerian negara/lembaga.

- e) Klasifikasi belanja berdasarkan program, merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
- f) Klasifikasi belanja berdasarkan kegiatan, adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semia jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
- g) Klasifikasi belanja berdasarkan sub kegiatan, merupakan bagian dari kegiatan yang terdiri atas dua atau lebih sub kegiatan yang menunjukkan keterkaitan dengan program serta memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur.
- h) Klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanja Belanja negara menurut jenisnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari :
  - 1) Belanja pegawai, digunakan untuk menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus dan belanja pegawai transito, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan.
  - 2) Belanja barang, digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan yang habis pakai untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara.
  - 3) Belanja modal, yang digunakan untuk menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). Pos belanja modal dirinci atas belanja modal aset tetap/fisik, dan belanja modal aset lainnya/non-fisik.

- 4) Pembayaran bunga utang, merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal aoutstanding) baik utang dalam atau luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- 5) Subsidi, yang digunakan untuk menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membayar beban subsidi atas komoditas vital dan strategis tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD) atau perusahaan swasta.
- 6) Hibah dalam negeri atau yang berasal dari luar negeri, berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang bersifat tidak mengikat, tidak terus-menerus serta tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - 1) Bantuan sosial, yang digunakan untuk menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan sebagai transfer uang/barang guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, misalnya transfer untuk pembayaran dana kompensasi sosial.
  - 2) Belanja lain-lain, pengeluaran yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan pos-pos pengeluaran di atas.<sup>38</sup>

### 3. Fungsi Belanja Negara

Belanja Negara secara garis besar setidaknya memiliki dua peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional. Tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu :

- a) Besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal Pemerintah, memiliki dampak yang signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional, serta

---

<sup>38</sup> Eko Prio Pribowo, 2011, *Evaluasi Anggaran Belanja Negara Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Pusat Penelitian Metalurgi-Lipi)*, Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor , Skripsi, hal. 11-14.

dapat mempengaruhi alokasi dan efisiensi sumber daya ekonomi dalam perekonomian.

- b) Berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan ketiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

## **F. Penelitian Terdahulu**

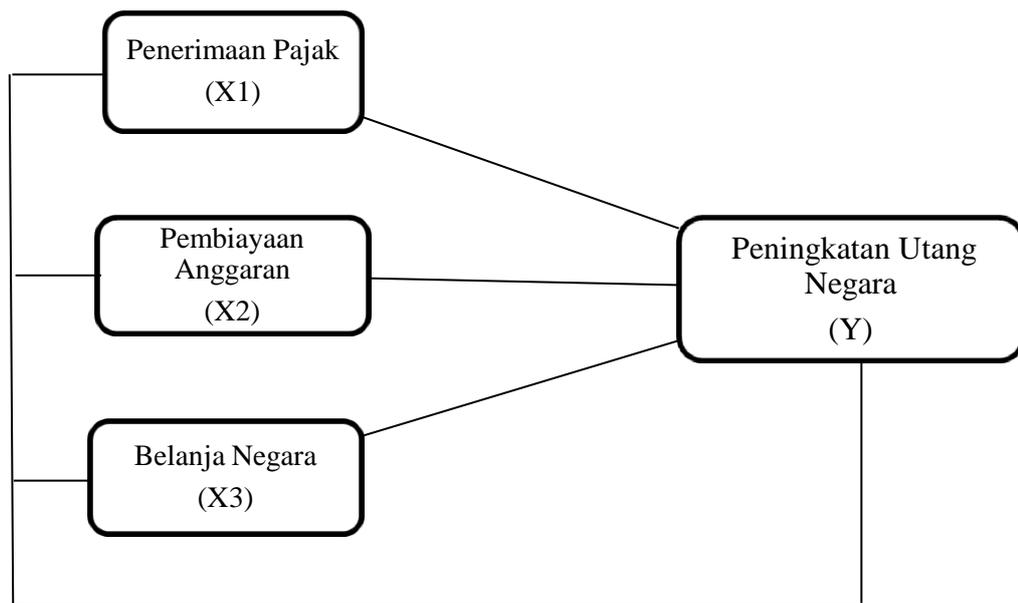
1. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso pengaruh penerimaan pajak, belanja negara dan pembiayaan anggaran terhadap peningkatan utang pemerintah pusat periode tahun 1981-2016 yang menghasilkan tiga hasil yaitu variabel penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan utang pemerintah pusat, variabel belanja negara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan utang pemerintah pusat dan variabel pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap peningkatan utang pemerintah pusat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Erianti “Hubungan antara utang luar negeri, pengeluaran Pemerintah dan capital flight di Indonesia periode 1975–2015” yang menghasilkan variabel Pengeluaran Pemerintah mempunyai hubungan yang kausalitas dengan Utang Luar Negeri (Utang Negara) di Indonesia pada tingkat kepercayaan 95%.
3. Penelitian yang dilakukan Fauzia berjudul “Analisis Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Apbn Indonesia Menurut Pandangan Islam” (Periode Tahun 2006-2011)”, Berdasarkan hasil pengujian dari kedua variabel tersebut, menunjukkan bahwa utang pemerintah (variabel independen) berpengaruh positif terhadap pendapatan Negara (variabel dependen), artinya sebanyak 81,4% pendapatan Negara dapat dijelaskan oleh variabel utang pemerintah dan sebanyak 80,0% belanja Negara dijelaskan oleh utang pemerintah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Inca Devi berjudul “Pengaruh PDB, Pengeluaran Pemerintah, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia”. Berdasarkan hasil pengujian dari Besar pengaruh PDB, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran terhadap utang luar negeri di

Indonesia sebesar 91,8%, sedangkan sisanya sebesar 8,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDB), belanja pemerintah, dan defisit anggaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap utang luar negeri di Indonesia

5. Penelitian yang dilakukan oleh Neng Dilah Nur Fadillah dan Hady Sutjipto berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia” Variabel Defisit Anggaran, Nilai Tukar, dan Utang Luar Negeri Sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri Indonesia. Sedangkan LIBOR dan Pembayaran Utang Luar Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri Indonesia tahun 1986-2015. Dan Variabel Defisit Anggaran, Nilai Tukar, LIBOR, Pembayaran Utang Luar Negeri, dan Utang Luar Negeri Sebelumnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri Indonesia tahun 1986-2015.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Arfah yang berjudul “Analisis Determinan Utang Luar Negeri Indonesia” Variabel Pendapatan Nasional (PDB), Investasi dan Defisit Anggaran. Dan Perkembangan Defisit Anggaran di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir selama tahun penelitian. Tetapi kesimpulannya adalah Defisit Anggaran tidak berpengaruh terhadap utang luar negeri.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Maychel Christian Ratag, Josep Bintang Kalangi dan Dennij Mandej berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Defisit Anggaran, Dan Tingkat Kurs Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia (Periode Tahun 1996-2016)”. Variabel Defisit anggaran mempunyai hubungan positif terhadap utang luar negeri dan berpengaruh signifikan. Ini sejalan dengan hasil estimasi beserta uji teori yang ada. Hal ini dikarenakan dalam tingginya defisit anggaran Indonesia maka akan menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar kembali utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati dan pemerintah akan sulit untuk mengendalikan kestabilan laju perekonomian Indonesia.

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan hubungan dari variabel bebas, dalam hal ini adalah Penerimaan Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran terhadap variabel terikat yaitu Peningkatan Utang Negara. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 : Diagram Kerangka Konseptual**

Pada kerangka konseptual diatas menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak (X1) berpengaruh terhadap variabel Peningkatan Utang Negara (Y), variabel Pembiayaan Anggaran (X2) berpengaruh terhadap Peningkatan Utang Negara (Y), dan Belanja Negara (X3) Variabel berpengaruh terhadap variabel Peningkatan Utang Negara (Y).

## I. Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, dapat ditarik kesimpulan hipotesis yaitu :

- Ha<sub>1</sub>** : Penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara
- Ho<sub>1</sub>** : Penerimaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara
- Ha<sub>2</sub>** : Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara
- Ho<sub>2</sub>** : Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara
- Ha<sub>3</sub>** : Belanja Negara Berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara
- Ho<sub>3</sub>** : Belanja Negara tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara
- Ha<sub>4</sub>** : Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Berpengaruh Signifikan terhadap Peningkatan Utang Negara
- Ho<sub>4</sub>** : Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Utang Negara

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Tujuan utama menggunakan metode ini untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Jenis penelitian kuantitatif deskriptif adalah suatu proses menemukan pengetahuan data berupa keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui untuk kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Secara harfiah, jenis deskriptif adalah jenis penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga berkehendak mengadakan akumulasi dasar.<sup>1</sup>

Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara terhadap Peningkatan Utang Negara. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (X) yaitu Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara, serta satu variabel terikat (Y) yaitu Peningkatan Utang Negara.

#### **B. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian saya dilakukan pada bulan juni 2020 sampai Oktober 2020 dengan cara melakukan pencarian data-data angka melalui laporan keuangan pemerintah pusat dan Laporan Postur APBN melalui website yang di publish oleh Kementrian Keuangan.

---

<sup>1</sup> S. Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.105.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang dipublikasi oleh kementerian keuangan yang dimana melaporkan data angka keuangan dari tahun 1990- 2019.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah data tahunan laporan antar penerimaan pajak, pembiayaan anggaran dan belanja negara terhadap peningkatan utang negara Indonesia sejak tahun 1990-2019.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui data sekunder berupa data kuantitatif meliputi data penerimaan pajak, pembiayaan anggaran dan belanja negara serta data utang negara

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dipublikasikan Kementerian Keuangan.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/>

**Tabel 3. 1 Data Variabel Dalam Hitungan Triliun Rupiah**

No	Tahun	Penerimaan Pajak	Pembiayaan Anggaran	Belanja Negara	Utang Negara
1	1990	22	-2	39	132
2	1991	24	1	44	148
3	1992	30	3	52	179
4	1993	36	1	57	169
5	1994	44	-3	62	210
6	1995	48	-5	65	282
7	1996	57	-4	82	301
8	1997	70	-2	109	732
9	1998	102	16	172	1.134
10	1999	125	44	231	1.056
11	2000	115	16	221	1.340
12	2001	185	40	341	1.349
13	2002	210	17	322	1.165
14	2003	242	35	376	1.177
15	2004	280	20	427	1.349
16	2005	347	8	757	1.342
17	2006	492	29	667	1.330
18	2007	409	42	509	1.430
19	2008	658	84	985	1.693
20	2009	619	112	937	1.681
21	2010	723	91	1.042	1.796
22	2011	873	130	1.294	1.947
23	2012	980	175	1.491	2.156
24	2013	1.077	237	1.650	2.652
25	2014	1.146	248	1.777	2.898
26	2015	1.240	323	1.806	3.493
27	2016	1.284	334	1.864	3.889
28	2017	1.343	336	2.007	4.407
29	2018	1.518	305	2.213	4.917
30	2019	1.546	402	2.309	5.340

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa data angka penelitian diperoleh dari mengunduh langsung dari publikasi langsung oleh Kementerian Keuangan melalui link yang terdapat dibawah ini : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat/> .

## F. Defenisi Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan membawa variasi pada nilai. Variabel merupakan objek pengamatan berupa fenomena yang diobservasi atau diukur dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah:

### 1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Realisasi penerimaan pajak tercantum dalam Laporan Realisasi APBN pada Perhitungan Anggaran Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dinyatakan dalam triliun rupiah untuk periode tahun 1990-2019. Variabel Penerimaan Pajak diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Penerimaan Pajak} = \text{Pajak Dalam Negeri} + \text{Pajak Perdagangan Internasional}$$

Sumber: UU KUP dan Postur APBN

- b. Pembiayaan Anggaran (PA) adalah realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Realisasi pembiayaan anggaran tercantum dalam Laporan Realisasi APBN pada Perhitungan Anggaran Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dinyatakan dalam triliun rupiah untuk periode tahun 1990-2019. Variabel pembiayaan anggaran diukur menggunakan rumus:

$$\text{Pembiayaan Anggaran} = \text{Penerimaan Pembiayaan} - \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$

Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Postur APBN Indonesia

- c. Belanja Negara (BN) adalah realisasi belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Realisasi belanja negara tercantum dalam Laporan Realisasi APBN pada Perhitungan Anggaran Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dinyatakan dalam triliun rupiah untuk periode tahun 1990-2019

Variabel belanja negara diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Belanja Negara} = \text{Belanja Pemerintah Pusat} + \text{Belanja Transfer ke Daerah}$$

Sumber: UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Postur APBN Indonesia

## 2. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah jumlah utang pemerintah pusat (TUP) yang terdiri dari Utang Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri periode tahun 1990-2019, berdasarkan data utang pemerintah pusat pada Kementerian Keuangan. Variabel utang pemerintah pusat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Utang Negara} &= \text{Utang Luar Negeri} + \text{Pinjaman Dalam Negeri} \\ &+ \text{Surat Utang Negara} \end{aligned}$$

Sumber: Laporan Keuangan pemerintah pusat, Kementerian Keuangan

## 3. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional bagian yang dapat mendefinisikan variabel agar dapat diukur dengan cara melihat pada indikator dari objek variabel.<sup>2</sup> Identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Indikator Variabel**

No	Nama Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Sumber
1	Penerimaan Pajak	Pungutan wajib yang di bayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum	Penerimaan Pajak = (Pajak Dalam Negeri + Pajak Perdagangan Internasional )	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
2	Pembiayaan Anggaran	. Digunakan untuk menutup anggaran akibat	Pembiayaan Anggaran = (Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) +Pembiayaan Luar Negeri (Neto) )	Laporan Keuangan Pemerintah

<sup>2</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta :Kencana, 2011, hal. 97.

		pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja Negara		Pusat (LKPP)
3	Belanja Negara	Merupakan semua pengeluaran dari rekening-kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah	Belanja Negara = ( Belanja Pemerintah Pusat + Transfer ke Daerah dan Dana Desa + Transfer ke Daerah)	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
4.	Utang Negara	Utang yang dijamin oleh pemerintah, sering disebut sebagai utang luar negeri	Utang Negara = (Kewajiban Jangka Pendek + Kewajiban Jangka Panjang)	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

## **G. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan penelitian data yang digunakan berupa kuantitatif maka model yang digunakan untuk data times series adalah analisis regresi berganda menggunakan metode *Least Quare* (LS) dengan syarat data menjadi stasioner pada derajat integrasi dan tidak stasioner ditingkat level. Dari hasil perhitungan dan analisis regresi untuk menjawab hipotesis yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui faktor mana yang paling memiliki pengaruh pada peningkatan utang negara.

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian ini untuk memastikan bahwa dalam regresi yang digunakan tidak terdapat Pengujian ini untuk memastikan bahwa dalam regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal.

#### **a. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pada penelitian kali ini untuk mengamati gejala multikolinearitas akan menggunakan metode VIF. Pengujian ini dengan membandingkan nilai VIF dengan kriteria jika nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinearitas jika nilai  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

#### **b. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode (t-1). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah Uji Breusch-Godfrey. Kriteria dalam Uji Breusch-Godfrey jika nilai probability chi-square lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif tetapi bila probability chi-square lebih kecil dari 0,05 maka terjadi autokorelasi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji Breusch-Godfrey. Uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat ( $U^2_t$ ) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian variabel independen. Uji Breusch-Godfrey dihitung dengan kriteria jika probability value  $Obs \cdot R\text{-Square}$  lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas jika lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

### d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam pengujian normalitas data ini, pada penelitian ini akan digunakan Uji Jaque-Bera dan melihat probabilitasnya dari hasil pengujian sebaran residual. Dengan ketentuan untuk nilai probabilitas  $H_0$  dari uji ini adalah jika nilai probabilitas dibawah  $\alpha$  (0,05) maka data terdistribusi normal, sedangkan  $H_a$

nya adalah jika probabilitas diatas  $\alpha$ , maka data terdistribusi tidak normal.<sup>3</sup>

## 2 . Uji Hipotesis

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (Variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka menggunakan uji hipotesis diantaranya :<sup>4</sup>

### a. Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara parsial atau tunggal dan simultan/bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t untuk memberikan gambaran besarnya signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Guna mengetahui besarnya signifikansi tersebut, maka dibandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai t- hitung lebih besar dibandingkan nilai t- tabel pada taraf signifikansi 5%, maka dapat variabel dependen dan sebaliknya. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun simultan

Adapun rumusnya adalah :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Keterangan :

$Y$  = Utang Negara

$\alpha$  = Konstanta

$b_1b_2$  = Koefisien Korelasi Berganda

$x_1$  = Penerimaan Pajak

$x_2$  = Pembiayaan Anggaran

$x_3$  = Belanja Negara

Uji signifikansi regresi berganda menggunakan uji-F untuk

---

<sup>3</sup> Imam Ghozali, *Analisis Multivariat dengan Menggunakan Program SPSS*, (Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 105

<sup>4</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Repository.uinsu.ac.id, hal.111-113.

mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara mengukur signifikansi tersebut adalah dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Apabila nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel pada tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

#### **b. Uji t parsial**

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan Atau tidak terhadap Variabel dependen. Untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen maka perumusan hipotesis dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2. Apabila probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### **c. Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara variable independen terhadap variable dependen secara bersama-sama.

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{R^2(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)}$$

Keterangan:

$R^2$  = koefisien determinasi

n = banyaknya sampel

k = banyaknya parameter koefisien regresi

Bentuk pengujiannya :

1.  $H_0 : b_1 = b_2 = 0$ , artinya secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2.  $H_a : b_1 = b_2 \neq 0$ , artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$
2.  $H_a$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$

#### **d. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi adalah koefisien untuk menentukan besarnya pengaruh variabel (naik/turunnya) nilai variabel bebas (variabel X) terhadap variasi (naik/turunnya) nilai variabel terkait (variabel Y) pada hubungan lebih dua variabel. Koefisien determinasi adalah cara utama digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel.<sup>5</sup>

---

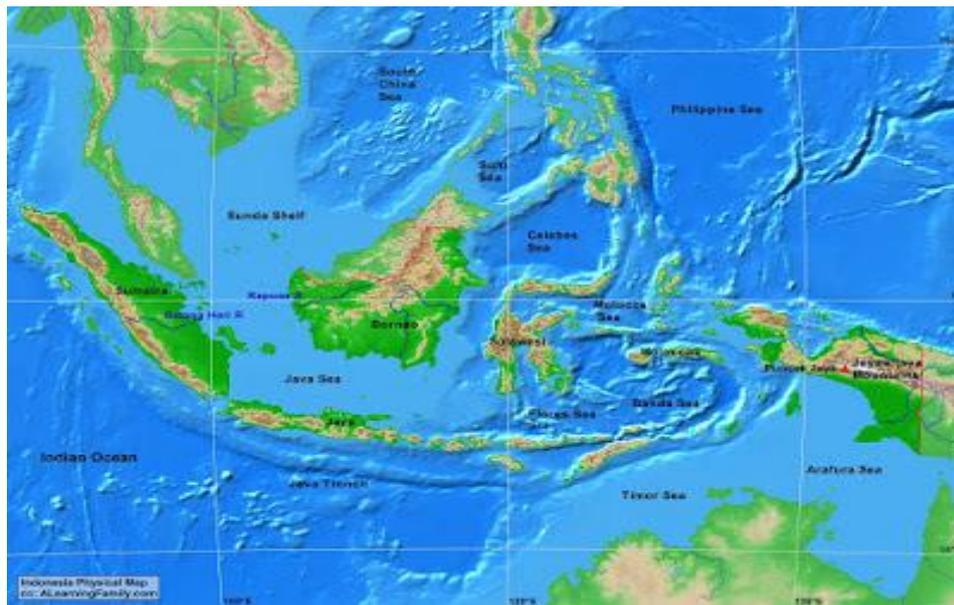
<sup>5</sup> Al-Ghafari, *Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, Kolerasi, dan Non Paremetik* (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 54.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis



**Gambar 4.1 Peta Indonesia**

Letak Koordinat geografis Indonesia  $6^{\circ}\text{LU} - 11^{\circ}08'\text{LS}$  dan dari  $95^{\circ}\text{BT} - 141^{\circ}45'\text{BT}$ , luas wilayah total darat:  $1.922.570 \text{ km}^2$ , daratan non-air:  $1.829.570 \text{ km}^2$ , daratan berair:  $93.000 \text{ km}^2$ , lautan:  $3.257.483 \text{ km}^2$ . Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terdiri atas pulau-pulau utama yaitu :

- a. Sumatera saat ini pulau Sumatera secara administratif pemerintahan terbagi atas 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung dan 2 provinsi lain yang merupakan pecahan dari provinsi induk di pulau Sumatra yaitu Riau Kepulauan dan Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Kalimantan Saat ini pulau Kalimantan secara administratif pemerintahan terbagi atas 5 provinsi yaitu Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara

- c. Jawa Saat ini pulau Jawa secara administratif pemerintahan terbagi atas 6 provinsi yaitu Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa - Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- d. Sulawesi Saat ini pulau Sulawesi secara administratif pemerintahan terbagi atas 6 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Utara.
- e. Sunda kecil saat ini secara administratif pemerintahan Kepulauan Sunda kecil dibagi atas 3 provinsi yaitu: Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- f. Maluku dan Irian Kepulauan Maluku dan Irian dibagi atas: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Irian Jaya.

Dan dengan ribuan pulau-pulau sedang dan kecil berpenduduk maupun tak berpenghuni. Wilayah ini merupakan konsentrasi penduduk Indonesia dan tempat sebagian besar kegiatan ekonomi Indonesia berlangsung.<sup>1</sup>

## **2. Kondisi Iklim Indonesia**

Iklim di Indonesia memiliki 3 macam iklim yaitu iklim musim (iklim muson), iklim tropika (iklim panas), dan iklim laut. Namun di Indonesia lebih dikenal dengan iklim tropis yang bisa disebut biasanya dengan sebutan iklim panas. Iklim yang tidak dimiliki oleh negara lain, tak heran jika orang dari mancanegara berdatangan ke Indonesia hanya untuk menikmati iklim yang tidak dimiliki dinegaranya seperti berjemur dibawah terik matahari, merasakan sensasi yang berbeda di musim panas.

## **3. Potensi Indonesia**

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dari sabang sampai marauke meliputi kekayaan minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral tambang yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, biji besi, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dan lain-

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia)

lain merupakan kekayaan alam bumi Nusantara, tidak hanya di pertambangan Indonesia juga kaya di bagian kelautan yang dimana Indonesia negara maritim yang memiliki garis pantai yang sangat panjang.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki potensi dalam menghasilkan bahan mentah dari perkebunan karet, minyak sawit yang dapat di ekspor ke luar negeri dan juga Indonesia memiliki potensi dalam pertanian padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan lain-lainnya yang jika di maksimalkan dalam menghasilkan hasil panen selain dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri juga bisa meningkatkan permintaan ekspor keluar negeri.

Indonesia juga memiliki potensi yang baik pada sektor industri yang dimana Indonesia memiliki banyak industri yang terbagi beberapa jenis yaitu :<sup>3</sup>

#### a. Klasifikasi Industri Berdasarkan Lokasi Unit Usaha

Klasifikasi industri di Indonesia yang pertama ialah klasifikasi industri menurut lokasi unit usahanya. Tujuan dan sarana kegiatan industri merupakan penentu letak dari industri tersebut. Di bawah ini terdapat macam macam industri menurut lokasi unit usahanya yaitu meliputi:

- 1) *Market Oriented Industry* (Industri Berorientasi pada Pasar), pengertian market oriented industry ialah industri yang berdiri di daerah dekat penyebaran konsumennya.
- 2) *Employment Oriented Industry* (Industri Berorientasi pada Tenaga Kerja), pengertian industri berorientasi pada tenaga kerja ialah industri yang berdiri di daerah dekat pusat pemukiman penduduk, khususnya wilayah yang mempunyai angkatan kerja banyak namun pendidikannya kurang.
- 3) *Supply Oriented Industry* (Industri Berorientasi pada Pengolahan), pengertian *supply oriented industry* ialah jenis industri yang berdiri

---

<sup>2</sup> I Nyoman Nurjaya, 2014, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Jakarta. Hal 10.

<sup>3</sup> <https://www.materi4belajar.com/2019/09/mengenal-klasifikasi-industri-di.html>

ditempat atau di dekat pengolahannya. Adapun contoh industrinya seperti di dekat batu gamping Palimanan terdapat industri semen, di dekat sumber amoniak dan pospat Palembang terdapat industri pupuk, dan di dekat kilang minyak Balong Indramayu terdapat industri BBM.

- 4) Industri Berorientasi pada Bahan Baku, pengertian industri berorientasi pada bahan baku ialah industri yang berdiri di tempat bahan baku telah tersedia. Adapun contoh industrinya yaitu industri tekstil yang dekat dengan industri konveksi. pelabuhan laut yang dekat dengan industri pengalengan ikan, serta lahan tebu yang dekat dengan industri gula.

#### b. Klasifikasi Industri Berdasarkan Proses Produksi

Setelah membahas tentang klasifikasi industri berdasarkan lokasi usahanya. Selanjutnya saya akan membahas klasifikasi industri di Indonesia yaitu klasifikasi industri menurut proses produksi. Di bawah ini terdapat macam macam industri menurut proses produksinya yaitu meliputi:

- 1) Industri Hulu, klasifikasi industri berdasarkan proses produksi yang pertama ialah industri hulu. Pengertian industri hulu ialah jenis industri yang pengolahannya hanya berupa bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Sifat industri tersebut ialah kegiatan produksi lain menggunakan bahan baku yang hanya disediakan. Adapun contohnya yaitu industri alumunium, industri baja, industri kayu lapis dan industri pemintalan.
- 2) Industri Hilir, klasifikasi industri berdasarkan proses produksi selanjutnya ialah industri hilir. Definisi industri hilir ialah industri yang melakukan pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga hasil barangnya dapat dinikmati atau dipakai langsung oleh konsumennya. Adapun contoh industrinya yaitu industri konveksi, industri mebel, industri pesawat terbang dan industri otomotif.

### c. Klasifikasi Industri Berdasarkan Produksi yang Dihasilkan

Selain klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha dan klasifikasi industri berdasarkan proses produksi di atas. Adapula klasifikasi industri di Indonesia seperti klasifikasi industri menurut produksi yang dihasilkan. Di bawah ini terdapat macam macam industri menurut produksi yang dihasilkan yaitu meliputi:

- 1) Industri Primer, klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan pertama ialah industri primer. Pengertian industri primer ialah jenis industri yang benda atau barang hasil produksinya tidak harus diolah secara lebih lanjut. Untuk itu hasil benda atau barangnya secara langsung dapat digunakan atau dinikmati. Adapun contoh industri primer yaitu industri konveksi, industri minuman, industri anyaman, dan industri makanan.
- 2) Industri Sekunder, klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan selanjutnya ialah industri sekunder. Definisi industri sekunder ialah jenis industri yang benda atau barang hasil produksinya harus diolah secara lebih lanjut sebelum dapat digunakan atau dinikmati langsung. Adapun contohnya seperti industri ban, industri tekstil, industri benang dan industri baja.
- 3) Industri Tersier, klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan selanjutnya ialah industri tersier. Industri tersier ialah industri yang tidak menghasilkan benda atau barang secara tidak langsung ataupun langsung untuk dapat digunakan atau dinikmati, tetapi menghasilkan jasa layanan yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi lebih terbantu dan mudah. Adapun contohnya seperti industri perbankan, industri pariwisata, industri angkutan, dan industri perdagangan.

### d. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Mentah

Selain klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha, klasifikasi industri berdasarkan proses produksi, dan klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan di atas. Adapula klasifikasi industri di Indonesia

seperti klasifikasi industri menurut bahan mentahnya. Di bawah ini terdapat macam macam industri menurut bahan mentah yaitu meliputi:

- 1) Industri Pertanian, berdasarkan bahan mentah yang pertama ialah industri pertanian. Pengertian industri pertanian ialah industri yang menggunakan bahan mentah dari hasil aktivitas pertanian sebelum kemudian diolah. Adapun contoh industri pertanian yaitu industri gula, industri teh, industri minyak goreng, industri makanan dan industri kopi.
- 2) Industri Pertambangan, klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah selanjutnya ialah industri pertambangan. Industri pertambangan ialah industri yang menggunakan bahan mentah dari hasil tambang untuk kemudian diolah menjadi barang jadi. Contohnya industri baja, industri serat sintetis, industri semen dan industri bahan bakar minyak bumi (BBM).
- 3) Industri Jasa, klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah selanjutnya ialah industri jasa. Definisi industri jasa ialah industri yang menggunakan jasa layanan untuk diolah sedemikian rupa agar beban masyarakat dapat dipermudah dan diringankan namun juga menguntungkan. Contohnya industri perdagangan, industri transportasi, industri seni hiburan, industri perbankan, dan industri pariwisata.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat dari analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan software eviews 10 dengan menggunakan analisis data Regresi Linier Berganda dan Asumsi Klasik

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui proses pengolahann dari instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh merupakan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Nota Keuangan APBN yang dipublikasikan oleh

Kementrian Keuangan. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh

### 1. Deskripsi Penerimaan Pajak

Data Penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil laporan data Kemenkeu yang tertera di Laporan Keuangan Pemerintah pusat. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 30 Tahun, mulai tahun 1990 sampai 2019.

**Tabel 4.1**

#### **Total Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Miliar Rupiah**

No	Tahun	Penerimaan Pajak	No	Tahun	Penerimaan Pajak
1	1990	22.011	16	2005	347.031
2	1991	24.919	17	2006	492.010
3	1992	30.092	18	2007	409.203
4	1993	36.665	19	2008	658.700
5	1994	44.442	20	2009	619.922
6	1995	48.686	21	2010	723.306
7	1996	57.340	22	2011	873.873
8	1997	70.934	23	2012	980.518
9	1998	102.395	24	2013	1.077.306
10	1999	125.952	25	2014	1.146.865
11	2000	115.913	26	2015	1.240.418
12	2001	185.541	27	2016	1.284.970
13	2002	210.088	28	2017	1.343.529
14	2003	242.048	29	2018	1.518.789
15	2004	280.558	30	2019	1.546.141

Sumber : Kemenkeu (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak Indonesia dari pajak dalam negeri maupun pajak dari perdagangan luar negeri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018. Penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 78,14 persen dari total realiasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2018, Pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja penerimaan perpajakan secara konsisten setiap tahunnya demi mewujudkan stabilitas Keuangan Negara. hasil positif yang diraih pemerintah tidak lepas dari pelaksanaan reformasi kebijakan dan transformasi organisasi perpajakan dalam rangka

membangun awareness masyarakat terhadap pelaksanaan perpajakan secara berkesinambungan yang diwujudkan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan teknologi informasi perpajakan.

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai Rp 1.518,78 triliun atau sebesar 93,86 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp 1.618.09 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp 1.343,52 triliun. Kinerja positif perpajakan tahun 2018 tersebut mampu mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 13,04 persen dari tahun 2017.<sup>4</sup>

Di tahun 2019 realisasi dari penerimaan pajak hanya dapat Rp 1.546 Triliun sedangkan pada rencana APBN 2019 perencanaan dalam penerimaan pajak RP 1.785 Triliun dapat di simpulkan bahwa penerimaan pajak tidak memenuhi target dalam perencanaan penerimaan pajak yang sudah di rencanakan dalam postur APBN 2019.

## **2. Deskripsi Belanja Negara**

Data Belanja Negara dalam penelitian ini menggunakan data yang di ambil yang mengacu pada pengeluaran negara. Cakupan belanja negara adalah mencakup belanja pegawai, barang modal, Pembayaran bunga utang, subsidi bantuan sosial dan juga transfer ke daerah. Belanja negara sangat diperlukan suatu negara untuk menjalankan sistem pemerintah dan bellanja negara dilakukan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan pertimbangan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara yang menjamin terlaksananya administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung dan mamantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Data Belanja Negara menggunakan data tahunan dari tahun 1990 sampai 2003 di peroleh dari Nota Keuangan APBN dan 2004 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh dari Laporan Resmi Kemenkeu di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

---

<sup>4</sup> Kemenkeu, *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Hal .37.

**Tabel 4.2****Total Belanja Negara Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Miliar Rupiah**

No	Tahun	Belanja Negara	No	Tahun	Belanja Negara
1	1990	39.754	16	2005	757.649
2	1991	44.581	17	2006	667.128
3	1992	52.048	18	2007	509.632
4	1993	57.833	19	2008	985.730
5	1994	62.607	20	2009	937.382
6	1995	65.342	21	2010	1.042.117
7	1996	82.221	22	2011	1.294.999
8	1997	109.302	23	2012	1.491.410
9	1998	172.670	24	2013	1.650.563
10	1999	231.878	25	2014	1.777.182
11	2000	221.466	26	2015	1.806.515
12	2001	341.563	27	2016	1.864.275
13	2002	322.180	28	2017	2.007.351
14	2003	376.505	29	2018	2.213.117
15	2004	427.176	30	2019	2.309.287

Sumber : Kemenkeu (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)

Berdasarkan pada tabel 4.2 yang diatas peningkatan Belanja negara setiap tahun dari tahun 1990 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2018 sangat menunjukkan nilai yang signifikan. Kenaikan belanja negara dipengaruhi oleh meningkatnya juga kebutuhan negara dalam hal infrastruktur dan juga kegiatan pemerintahan yang membutuhkan anggaran lebih untuk merealisasi rencana pembangunan kota dan desa

Berdasarkan realisasi belanja menurut jenis belanja (ekonomi), nilai realisasi terbesar terjadi pada belanja pegawai yang mencapai Rp346,89 triliun atau 94,86 persen dari pagu dalam APBN 2018, diikuti Belanja Barang yang mencapai Rp347,46 triliun atau 102,16 persen dari APBN 2018. Kinerja realisasi belanja pegawai selama tahun 2018 antara lain dipengaruhi adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka mendukung pemantapan reformasi birokrasi serta adanya pemberian gaji ke-13 dan THR (termasuk bagi para pensiunan) untuk

mempertahankan kesejahteraan aparatur negara.<sup>5</sup>

Dan di tahun 2019 realisasi belanja negara menyentuh angka Rp 2.309 Triliun ini meningkat sedikit di bandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah Rp 2.213 Triliun namun di tahun 2019 di anggarkan sejumlah Rp 2.461 Triliun dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja tidak sesuai dengan APBN dalam realisasi untuk tahun 2019 nya di karena faktor penerimaan pajak yang juga tidak mencapai target anggaran.

### 3. Deskripsi Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan Anggaran merupakan kebijakan yang di ambil untuk defisit anggaran yang dimana dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2018 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2018 sebesar Rp 269,44 triliun dan Produk Domestik Bruto tahun 2018 sebesar Rp14.837,40 triliun, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 1,79 persen, pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang.

**Tabel 4.3**

**Total Pembiayaan Anggaran Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Miliar Rupiah**

No	Tahun	Pembiayaan Anggaran	No	Tahun	Pembiayaan Anggaran
1	1990	-2.439	16	2005	8.872
2	1991	1.999	17	2006	29.415
3	1992	3.186	18	2007	42.456
4	1993	1.720	19	2008	84.071
5	1994	-3.811	20	2009	112.583
6	1995	-5.998	21	2010	91.552
7	1996	-4.057	22	2011	130.948
8	1997	-2.809	23	2012	175.158
9	1998	16.199	24	2013	237.394
10	1999	44.060	25	2014	248.892
11	2000	16.132	26	2015	323.108
12	2001	40.485	27	2016	334.503
13	2002	17.107	28	2017	366.623

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 41

14	2003	35.109	29	2018	305.692
15	2004	20.795	30	2019	402.051

Sumber : Kemenkeu (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2018, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp305,69 triliun atau 93,79 persen dari target APBN tahun 2018 sebesar Rp325,93 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2017 yang memiliki nilai sebesar Rp366,62 triliun. Kebijakan pembiayaan tersebut ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal serta efisiensi APBN di tengah kondisi perekonomian global yang ditandai dengan suku bunga *The Fed* yang mengalami tren peningkatan, serta depresiasi mata uang nasional terhadap Dolar AS, sebagaimana tren penurunan mayoritas mata uang negara-negara di dunia.

Realisasi tersebut berasal dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp367,46 triliun atau 92,05 persen dari targetnya, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp61,11 triliun setara dengan 93,08 persen dari targetnya, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp4,03 triliun atau 60,27 persen dari target, realisasi kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp1,12 triliun atau 100 persen dari target, serta realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,17 triliun atau 92,14 persen dari targetnya dalam APBN 2018.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam realisasi 2019 pembiayaan anggaran menembus angka Rp 402 Triliun ini jauh lebih dalam peningkatan di tahun-tahun pembiayaan anggaran sebelumnya yang juga di faktorin oleh penerimaan negara yang tidak mencapai target APBN sehingga membuat kebijakan defisit anggaran dan melakukan pembiayaan anggaran.

#### 4. Deskripsi Utang Negara

Indonesia saat ini masih memiliki potensi yang besar dalam hal peningkatan peringkat utang. Dalam pandangan beberapa lembaga pemeringkat, penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal. Rasio pajak Indonesia yang masih relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 48

sebanding (*peer countries*) merupakan salah satu faktor yang harus terus diperbaiki. Struktur perekonomian Indonesia yang mempunyai keterkaitan besar kepada komoditas juga memiliki ruang untuk perbaikan mengingat adanya kekhawatiran adanya kerentanan apabila terjadi guncangan pada harga atau permintaan komoditas dunia.

Walaupun lembaga pemeringkat telah memberikan apresiasi positif terhadap upaya reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, konsistensi pelaksanaan reformasi ini juga menjadi faktor yang menjadi perhatian para lembaga pemeringkat, Peningkatan ini diharapkan dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia, sebagaimana diindikasikan oleh kenaikan peringkat utang, maka imbal hasil (*yield*) yang ditawarkan oleh pemerintah pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik untuk pembiayaan APBN maupun *refinancing*, dapat ditekan seefisien mungkin.

Walaupun pemerintah dalam melakukan kebijakan utang untuk meningkatkan perekonomian ini tetap saja akan menambah jumlah peningkatan utang negara ini berdampak pada naiknya beban cicilan utang yang masuk dalam agenda pemerintah untuk melakukan proses pelunasan dengan melakukan kebijakan pada pendapatan negara dan juga pada tahun 2017 sampai 2018 kenaikan utang negara meningkat sangat signifikan dari tahun sebelum-sebelumnya, bisa dilihat data dari tahun 1999 sampai dengan 2019 di tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4**

**Total Utang Negara Indonesia Tahun 1990-2019 dalam Miliar Rupiah**

No	Tahun	Utang Negara	No	Tahun	Utang Negara
1	1990	132.966	16	2005	1.342.050
2	1991	148.834	17	2006	1.330.063
3	1992	179.876	18	2007	1.430.965
4	1993	169.887	19	2008	1.693.691
5	1994	210.370	20	2009	1.681.708
6	1995	282.881	21	2010	1.796.078

7	1996	301.447	22	2011	1.947.373
8	1997	732.746	23	2012	2.156.885
9	1998	1.134.270	24	2013	2.652.099
10	1999	1.056.937	25	2014	2.898.383
11	2000	1.340.818	26	2015	3.493.530
12	2001	1.349.823	27	2016	3.889.949
13	2002	1.165.413	28	2017	4.407.053
14	2003	1.177.270	29	2018	4.917.477
15	2004	1.349.042	30	2019	5.340.221

Sumber : Kemenkeu (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)

Dalam data utang negara pada tabel 4.4 tahun 2017 sebesar Rp. 4.407,05 triliun yang meningkat menjadi Rp. 4.917,47 triliun di tahun 2018 dan terus meningkat menjadi Rp 5.340,22 Triliun di tahun 2019, dari angka tersebut bisa dilihat peningkatan utang negara yang terdiri utang dalam negeri dan luar negeri meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang sangat mengalami peningkatan yang signifikan sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara melalui komponen penerimaan pajak karena seperti yang dilihat pada tabel 4.1 yang dimana pajak menjadi sumber pendapatan tertinggi dari komponen pendapatan negara lainnya.

Sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan pada proses melunasi utang negara dengan cara meningkatkan pendapatan negara dan tidak mengandalkan penerimaan pajak namun menggunakan komponen pendapatan negara lainnya yang berpotensi menghasilkan peningkatan pendapatan negara non pajak misalnya pendapatan dari sumber daya alam yang dikelola dengan baik oleh pemerintah yang kedepannya dapat menghasilkan pendapatan negara yang bisa membantu melunasi utang negara.

### C. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan karena dalam model regresi model regresi perlu memerhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak di penuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji non-multikolinearitas, non-autokorelasi, homoskedastisitas dan normalitas.

## 1. Uji non-multikolinearitas

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
Date: 11/15/20 Time: 14:52  
Sample: 1990 2019  
Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.211428	378.2162	NA
LNx1	0.008014	581.9749	9.613723
LNx2	0.002349	87.99315	5.729283
X3	1.51E-08	45.92765	9.804292

Dari gambar diatas dapat dilihat nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi.

## 2. Uji Non-Auto Korelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t -1 (sebelumnya).

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.380445	Prob. F(2,15)	0.6900
Obs*R-squared	1.013818	Prob. Chi-Square(2)	0.6024

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/15/20 Time: 14:52

Sample: 1990 2019

Included observations: 30

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.023888	0.478331	-0.049941	0.9608
LNx1	0.001211	0.093125	0.013007	0.9898

LN <sub>X2</sub>	0.007307	0.051936	0.140701	0.8900
X <sub>3</sub>	-1.42E-05	0.000129	-0.110397	0.9136
RESID(-1)	0.228837	0.262429	0.871995	0.3970
RESID(-2)	-0.034114	0.265344	-0.128563	0.8994
R-squared	0.048277	Mean dependent var	-9.15E-16	
Adjusted R-squared	-0.268964	S.D. dependent var	0.099892	
S.E. of regression	0.112527	Akaike info criterion	-1.296298	
Sum squared resid	0.189933	Schwarz criterion	-0.997864	
Log likelihood	19.61113	Hannan-Quinn criter.	-1.231530	
F-statistic	0.152178	Durbin-Watson stat	1.815192	
Prob(F-statistic)	0.976164			

Berdasarkan hasil uji di atas diketahui bahwa hasil uji autokorelasi dengan metode LM menunjukkan nilai *Prob.Chi-Square(2)* sebesar 0.6024 >  $\alpha$  (0,05). Sehingga berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat Autokorelasi didalam model.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan yang dimana semua gangguan muncul dalam fungsi populasi tidak memiliki varian yang sama. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji White

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.309781	Prob. F(9,11)	0.9554
Obs*R-squared	4.246336	Prob. Chi-Square(9)	0.8945
Scaled explained SS	1.437126	Prob. Chi-Square(9)	0.9976

Test Equation:

Dependent Variable: RESID<sup>2</sup>

Method: Least Squares

Date: 11/15/20 Time: 14:53

Sample: 1990 2019

Included observations: 30

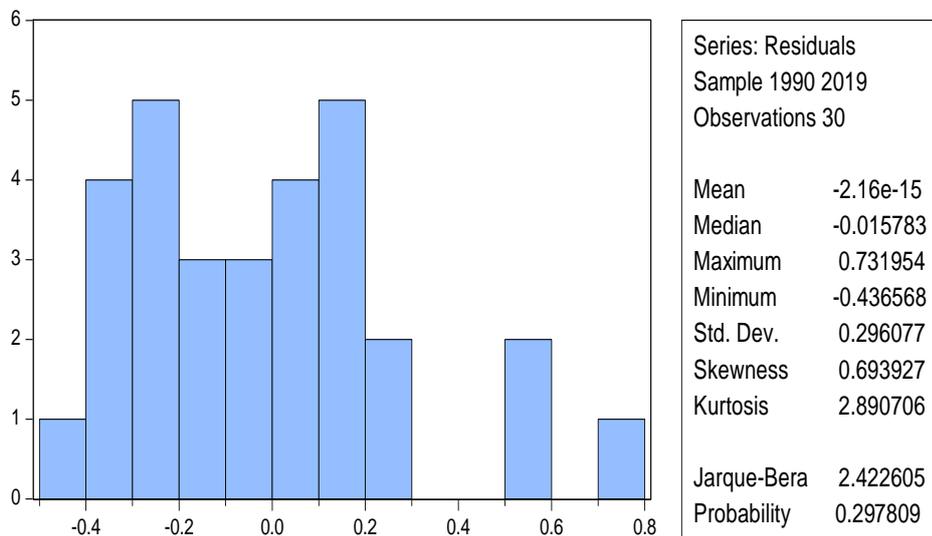
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.033563	1.073951	-0.031251	0.9756
LN <sub>X1</sub> <sup>2</sup>	0.005521	0.046164	0.119598	0.9070
LN <sub>X1</sub> *LN <sub>X2</sub>	6.78E-05	0.000152	0.445413	0.6647
LN <sub>X1</sub> *X <sub>3</sub>	-0.021152	0.030385	-0.696119	0.5008
LN <sub>X1</sub>	-0.008998	0.436538	-0.020612	0.9839
LN <sub>X2</sub> <sup>2</sup>	-3.66E-08	7.95E-08	-0.460403	0.6542
LN <sub>X2</sub> *X <sub>3</sub>	-3.99E-06	5.90E-05	-0.067552	0.9474
LN <sub>X2</sub>	-0.000375	0.000785	-0.477019	0.6427
X <sub>3</sub> <sup>2</sup>	0.007870	0.010816	0.727611	0.4821
X <sub>3</sub>	0.069768	0.169299	0.412101	0.6882
R-squared	0.202206	Mean dependent var	0.009503	
Adjusted R-squared	-0.450534	S.D. dependent var	0.009897	

S.E. of regression	0.011919	Akaike info criterion	-5.715539
Sum squared resid	0.001563	Schwarz criterion	-5.218147
Log likelihood	70.01316	Hannan-Quinn criter.	-5.607592
F-statistic	0.309781	Durbin-Watson stat	2.328783
Prob(F-statistic)	0.955392		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedesitas menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* (8) = 0.8945 >  $\alpha$  (0.05), sehingga pada tingkat signifikansi sebesar 5% dapat dikatakan bahwa varian dari residual sama.

#### 4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera yang di hasilkan adalah sebesar 2.4226 dengan nilai probability sebesar 0.2978, yang mana nilai probability ini lebih besar dari nilai alpha yang digunakan (0.2978 >  $\alpha$  (0.05)). Sehingga pada tingkat signifikansi sebesar 5% dapat dikatakan bahwa eror pada model telah berdistribusi normal.

## D. Uji Hipotesis

**Tabel 4.8**  
**Hasil Estimasi Regresi**

$$\text{Model: } Y_t = C + X_{1t} + X_{2t} + X_{3t} + e_t$$

Dependent Variable: LNY  
Method: Least Squares  
Date: 11/15/20 Time: 14:49  
Sample: 1990 2019  
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.995646	0.459813	17.38890	0.0000
LN <sub>X1</sub>	-0.251608	0.089519	-2.810656	0.0120
LN <sub>X2</sub>	0.036540	0.048461	0.754002	0.4612
X <sub>3</sub>	0.000939	0.000123	7.634122	0.0000
R-squared	0.962562	Mean dependent var	7.606309	
Adjusted R-squared	0.955955	S.D. dependent var	0.516263	
S.E. of regression	0.108348	Akaike info criterion	-1.437293	
Sum squared resid	0.199568	Schwarz criterion	-1.238337	
Log likelihood	19.09158	Hannan-Quinn criter.	-1.394115	
F-statistic	145.6927	Durbin-Watson stat	1.417091	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel di atas model estimasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln}\hat{Y}_t = 7.9956^* - 0.2516\text{Ln}X_{1t}^* + 0.0365\text{Ln}X_{2t}^* + 0.0009X_{3t}^*$$

Keterangan:

\*) Signifikan pada tingkat signifikansi sebesar 5%

### Uji Keberartian Model

#### 1. koefisien determinasi ( *Adjusted r Square* )

Dari hasil regresi diatas maka diperoleh nilai Adjusted r Square. Digunakannya nilai Adjusted s Square karena Adjusted s Square telah menghilangkan pengaruh dari efek penambahan variabel bebas kedalam model yang menghasilkan nilai sebesar 0.9559. besaran nilai inni berarti bahwa 95.59 % keragaman utang negara Indonesia Tahun 1990-2019 dapat dijelaskan oleh variabel penerimaan pajak, belanja negara dan pembiayaan anggaran, sedangkan sisanya (4.41%) di jelaskan oleh varibael lain yang berada di luar model.

## 2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan membandingkan nilai F- hitung dan t-tabel.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa F-hitung adalah 145.6927 nilai ini lebih besar dari F tabel . Nilai Prob F- Hitung (0.000000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. sehingga pengujian hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang mempengaruhi Utang Negara (Y) Indonesia pada tahun 1990-2019.

## 3. Uji t

Signifikannya atau tidaknya pengaruh dari setiap variabel bebas yang digunakan dalam model telah ditunjukkan melalui uji parsial yang dalam penelitian ini menggunakan uji t. Tingkat signifikannya yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%, sehingga variabel penerimaan pajak (x1) pembiayaan anggaran (X2) dan Belanja Negara (X3) yang memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan untuk variabel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Utang negara Indonesia pada tahun 1990-2019 pada tingkat signifikannya sebesar 5%.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>P. value</b>	<b>Keputusan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>INTERCEPT</b>	7.9956	0.0000	Tolak $H_0$
<b>LnX1</b>	-0.2516	0.0120	Tolak $H_0$
<b>LnX2</b>	0.0365	0.4612	Gagal Tolak $H_0$
<b>X3</b>	0.0009	0.0000	Tolak $H_0$

## **E. Pembahasan**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara, terhadap Utang Negara, berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan menggunakan program eviews 10 hasil Uji Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara, Berpengaruh signifikan dan positif terhadap Peningkatan Utang Negara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima

### **1. Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Peningkatan Utang Negara**

Berdasarkan hasil regresi Penerimaan Pajak memperoleh nilai koefisien - 0.2516 dan nilai probabilitas sebesar 0.0120 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan nilai penerimaan pajak sebesar 1% (triliun) maka utang negara akan mengalami penurunan sebesar 0.2516 % dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil penelitian yang dilakukan ini sesuai dengan temuan dari Budi Santoso yang menemukan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan utang pemerintah pusat dimana dalam hasil penelitian tersebut penerimaan pajak tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang melakukan kebijakan anggaran yang ekspansif dimana belanja negara selalu lebih besar dari jumlah penerimaan pajak.

Dalam teori Ricardian yang menyatakan bahwa utang di sebabkan oleh penerimaan pajak yang rendah dimasa sekarang yang akan mengakibatkan pemerintah akan melakukan utang dimasa yang akan datang, menurut Ricardian penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk mendanai pemerintah namun besaran pajak yang diterima seringkali tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Dalam mengoptimalkan program pemerintah sudah semestinya negara harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan dengan kebijakan APBN namun ini tidak di imbangin dengan penerimaan pajak yang tidak dapat mengimbangi APBN ini akan membuat

pemerintah melakukan kebijakan utang luar negeri yang mengakibatkan utang negara terus meningkat.

## **2. Pengaruh Pembiayaan Anggaran terhadap Peningkatan Utang Negara**

Berdasarkan hasil regresi Pembiayaan Anggaran memperoleh koefisien 0.0365 dan probabilitas sebesar 0.4612 lebih besar dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa pembiayaan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap utang negara Indonesia pada periode tahun tersebut

Hasil penelitian yang dilakukan ini mendukung dari temuan dari Wahyudin Arfan (2016) yang menemukan bahwa pembiayaan anggaran yang dimana karena terjadi defisit anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan utang negara walaupun setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan usaha pemerintah Negara Indonesia setiap tahunnya terus meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan penerimaan pajak serta melakukan penghematan pada sisi pengeluaran seperti pengurangan subsidi dan mengurangi pengeluaran program-program tidak produktif dan tidak efisien yang tidak mendukung pertumbuhan sektor riil, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa

Menurut teori Ekonom Hyman yang mendefinisikan pembiayaan anggaran terjadi karena defisit anggaran yang merupakan kelebihan pengeluaran negara dari penerimaan negara yang terdiri dari pajak dan pungutan lainnya yang di peroleh pemerintah dan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, defisit anggaran pemerintah adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara sehingga pemerintah membuat kebijakan menanggulangi defisit anggaran dengan pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran mengartikan bahwa akan melakukan Kebijakan defisit anggaran yang dimana dilakukan ketika anggaran mengalami kekurangan untuk memenuhi APBN yang sudah di rencanakan pemerintah yang dimana pembiayaan anggaran tersebut tidak melebihi 3% dari jumlah PDB negara yang sudah di atur menurut PP nomor 23 Tahun 2003.

### **3. Pengaruh Belanja Negara terhadap Peningkatan Utang Negara**

Berdasarkan hasil regresi Belanja Negara memperoleh nilai Koefisien 0.0009 dan probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap terjadi peningkatan belanja negara sebesar 1 Triliun maka utang negara akan mengalami peningkatan sebesar 0.0009% dengan sumbu variabel bebas lainnya konstan.

Hasil penelitian yang dilakukan ini mendukung temuan dari Kartika (2018) yang menemukan bahwa pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan terhadap utang luar negeri karena semakin banyak pengeluaran pemerintah akan semakin menyebabkan anggaran semakin defisit jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan maka pemerintah membutuhkan utang untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

Menurut teori Wagner yang mengemukakan bahwa belanja negara akan meningkat sejalan dengan pendapatan negara, sehingga peningkatan belanja harus diimbangi dengan pendapatan yang diterima namun jika terjadi defisit karena belanja negara lebih besar maka pemerintah akan melakukan kebijakan utang negara

Kesimpulan dari teori tersebut adalah peningkatan utang negara itu bisa disebabkan karena kebutuhan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara sehingga pemerintah melakukan kebijakan utang sehingga peningkatan utang negara terus meningkat sehingga dalam jangka panjang pemerintah harus memikirkan peningkatan pembayaran cicilan utang negara melalui anggaran belanja negara di periode berikutnya

### **4. Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara**

Pada tingkat signifikan sebesar 5% Penerimaan Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan utang negara Indonesia Tahun 1990-2019. Karena. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa F-hitung adalah 145.6927 nilai ini lebih besar dari F tabel . Nilai Prob F- Hitung (0.000000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. sehingga pengujian

hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel penerimaan pajak ( $X_1$ ) dan Belanja Negara ( $X_3$ ) yang memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan untuk variabel pembiayaan anggaran ( $X_2$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Utang negara Indonesia pada tahun 1990-2019 pada tingkat signifikannya sebesar 5%.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang di peroleh maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan utang negara periode 1990-2019. Pengaruh penerimaan pajak tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menaruh anggaran belanja negara selalu lebih besar dari pada penerimaan pajak, peningkatan penerimaan pajak semakin membuat pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang negara karena adanya pemasukan penerimaan pajak yang selalu meningkat
2. Pembiayaan Anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan utang negara periode 1990-2019. Kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit anggaran sangat dibutuhkan sehingga untuk menutupi kekurangan dalam melakukan operasional pemerintahan dan pembangunan membuat pemerintah melakukan kebijakan pembiayaan anggaran yang menyebabkan utang negara meningkat namun disisi lain pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak, penghematan pengeluaran dan mengurangi subsidi dan dalam jangka panjang negara tidak perlu lagi menggunakan kebijakan defisit anggaran yang menyebabkan utang negara meningkat.
3. Belanja Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan utang negara periode 1990-2019. Pengaruh belanja negara tidak terlepas dari kebutuhan belanja negara yang terus meningkat yang diikuti kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam melakukan pembangunan dan diikuti realisasi pembangunan. Peningkatan belanja negara semakin membuat pemerintah melakukan utang negara dikarenakan pendapatan dari penerimaan pajak belum bisa memenuhi kebutuhan negara yang terus

meningkat setiap tahunnya

4. Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara secara simultan berpengaruh Signifikan terhadap Peningkatan Utang Negara periode 1990-2019 maka jika ada penelitian yang menyatakan bahwa variabel penerimaan pajak (X1) dan Belanja Negara (X3) yang memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan untuk variabel pembiayaan anggaran (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Utang negara Indonesia pada tahun 1990-2019 pada tingkat signifikannya sebesar 5%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah agar kedepannya mengurangi ketergantungan terhadap utang dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir utang pemerintah menjadi polemik permasalahan di Indonesia yang menyatakan utang negara sudah tidak terkendali oleh keuangan negara. Pemerintah kedepannya perlu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dan pendapatan negara lainnya yang non pajak seperti potensi sumber daya alam yang jika meningkat bisa membiayai belanja negara kedepannya. Selain itu pemerintah juga perlu mengefisieni terhadap belanja negara yang dilakukan sehingga bisa lebih efektif dalam penggunaannya dan utang tidak terus meningkat jumlahnya dan berusaha agar utang menjadi berkurang jumlahnya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan hanya membahas faktor dibidang keuangan, maka untuk penelitian selanjutnya peneliti bisa menggunakan faktor yang lebih luas seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, dan nilai tukar rupiah dan dihubungkan dengan peningkatan utang negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin Oyok., 2018, *Perpajakan Dan Retribusi*, CV MEGA RANCAGE.
- Al-Ghafari, *Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, Kolerasi, dan Non Paremetik* (Yogyakarta: BPFE, 1997).
- Cermati.com, 2020, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2014, *Postur APBN Indonesia*.
- Direktorat Penyusun APBN, *Direktorat Jendral Anggaran, 2014, Dasar-Dassar Prakter Penyusunan APBN Di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadillah Hanif, 2018, *Analisis Hubungan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
- Fatturoyhan, Afif Mufti, 2017, *Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)*.
- Ghozali Imam, *Analisis Multivariier dengan Menggunakan Program SPSS*, (Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2011).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).
- Irlan Fery Idris, 2015, *Pengantar Perpajakan Dengan Teori dan Kasus*, Grasindo, Jakarta.
- Isroah, 2013, *Perpajakan, Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU)* Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Imsar , *Ekonomi Mikro Islam*, (sumber: <http://repository.uinsu.ac.id/1311/1/Diktat%201%20imsar.pdf>).

Kadir Abdul, 2005, *Ruang Lingkup Perpajakan Dan Kapita Seleka Perpajakan Di Indonesia* , Grasindo, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, APBN kita Kinerja dan Fakta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995, Nomor KEP.031/KET/5/1995 Tahun 1995,

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992).

Mas Rasmini, *Dasar- Dasar Perpajakan*, Modul.

Misanam Munrokhim, *Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 th. 2000.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta :Kencana.

Pajak.co.id.

Peraturan Pemerintah, Nomor 23 Tahun 2003.

Perpajakan.ddtc.co.id

Pribowo Prio Eko, 2011, *Evaluasi Anggaran Belanja Negara Sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Pusat Penelitian Metalurgi–Lipi), Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor* , Skripsi.

Rahmawati Nurlathifah, 2009, *Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dengan Adanya Sunset Policy Serta Kontribusinya Dalam Perpajakan Di Kpp Pratama Karanganyar*, Program Studi Diploma Iii Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi

- Rahmani Bi Ahmad Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Repository.uinsu.ac.id.
- Satya Eka Venti, 2015, Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah Dan Permasalahannya, Jurnal.
- Syafiq Mahmadah Hanafi, *Hutang Luar Negeri Antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis*, Jurnal Asy- Syir'ah No. 7 Th. 2000.
- Syahbudi, *Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Repository.uinsu.ac.id
- Tambunan Khairina, *Diktat Ekonomi Pembangunan*, Repository.uinsu.ac.id.
- Tanjung Mirna, 2003, *Buku Ajar Perpajakan*, Univ Negeri Padang, Padang.
- Udhar Adriani Ayu Nely, 2016, *Analisis Pengaruh Pendapatan, Defisit Anggaran Melalui Pengeluaran Domestik, Pelunasan Utang Dan Libor Terhadap Utang Luar Negeri Periode 2000-2014*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
- Waluyo Joko, 2009, Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran, Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Widiyanti Ika, 2000, *Administrasi Pajak*, Sinar Mandiri, Jakarta.
- Zunaidi Achmad, 2017, *Pembiayaan Anggaran Bukan Sekadar Defisit dan Utang*, Direktorat Jendral Anggaran, Jakarta.
- Zunaidi Dkk, 2017, *Pembiayaan Anggaran : Bukan Sekadar Definisi Dan Utang*, Jakarta, Direktorat Jenderal Anggaran.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Rekapitulasi Data

No	Tahun	Penerimaan Pajak	Belanja Negara	Pembiayaan Anggaran	Utang Negara
1	1990	22.011	39.754	-2.439	132.966
2	1991	24.919	44.581	1.999	148.834
3	1992	30.092	52.048	3.186	179.876
4	1993	36.665	57.833	1.720	169.887
5	1994	44.442	62.607	-3.811	210.370
6	1995	48.686	65.342	-5.998	282.881
7	1996	57.340	82.221	-4.057	301.447
8	1997	70.934	109.302	-2.809	732.746
9	1998	102.395	172.670	16.199	1.134.270
10	1999	125.952	231.878	44.060	1.056.937
11	2000	115.913	221.466	16.132	1.340.818
12	2001	185.541	341.563	40.485	1.349.823
13	2002	210.088	322.180	17.107	1.165.413
14	2003	242.048	376.505	35.109	1.177.270
15	2004	280.558	427.176	20.795	1.349.042
16	2005	347.031	757.649	8.872	1.342.050
17	2006	492.010	667.128	29.415	1.330.063
18	2007	409.203	509.632	42.456	1.430.965
19	2008	658.700	985.730	84.071	1.693.691
20	2009	619.922	937.382	112.583	1.681.708
21	2010	723.306	1.042.117	91.552	1.796.078
22	2011	873.873	1.294.999	130.948	1.947.373
23	2012	980.518	1.491.410	175.158	2.156.885
24	2013	1.077.306	1.650.563	237.394	2.652.099
25	2014	1.146.865	1.777.182	248.892	2.898.383
26	2015	1.240.418	1.806.515	323.108	3.493.530
27	2016	1.284.970	1.864.275	334.503	3.889.949
28	2017	1.343.529	2.007.351	366.623	4.407.053
29	2018	1.518.789	2.213.117	305.692	4.917.477
30	2019	1.546.141	2.309.287	402.051	5.340.221

Lampiran 2

**Hasil Regres Menggunakan Eviews 10**

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 11/15/20 Time: 14:49

Sample: 1990 2019

Included observations: 30

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.995646	0.459813	17.38890	0.0000
LN1	-0.251608	0.089519	-2.810656	0.0120
X2	0.000939	0.000123	7.634122	0.0000
LN3	0.036540	0.048461	0.754002	0.4612

---

---

R-squared	0.962562	Mean dependent var	7.606309
Adjusted R-squared	0.955955	S.D. dependent var	0.516263
S.E. of regression	0.108348	Akaike info criterion	-1.437293
Sum squared resid	0.199568	Schwarz criterion	-1.238337
Log likelihood	19.09158	Hannan-Quinn criter.	-1.394115
F-statistic	145.6927	Durbin-Watson stat	1.417091
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

### Lampiran 3

#### Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.380445	Prob. F(2,15)	0.6900
Obs*R-squared	1.013818	Prob. Chi-Square(2)	0.6024

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/15/20 Time: 14:52

Sample: 1990 2019

Included observations: 30

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.023888	0.478331	-0.049941	0.9608
LNx1	0.001211	0.093125	0.013007	0.9898
X2	-1.42E-05	0.000129	-0.110397	0.9136
LNx3	0.007307	0.051936	0.140701	0.8900
RESID(-1)	0.228837	0.262429	0.871995	0.3970
RESID(-2)	-0.034114	0.265344	-0.128563	0.8994

R-squared	0.048277	Mean dependent var	-9.15E-16
Adjusted R-squared	-0.268964	S.D. dependent var	0.099892
S.E. of regression	0.112527	Akaike info criterion	-1.296298
Sum squared resid	0.189933	Schwarz criterion	-0.997864
Log likelihood	19.61113	Hannan-Quinn criter.	-1.231530
F-statistic	0.152178	Durbin-Watson stat	1.815192
Prob(F-statistic)	0.976164		

Lampiran 4

**Hasil Uji Heteroskedetisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.309781	Prob. F(9,11)	0.9554
Obs*R-squared	4.246336	Prob. Chi-Square(9)	0.8945
Scaled explained SS	1.437126	Prob. Chi-Square(9)	0.9976

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/15/20 Time: 14:53

Sample: 1990 2019

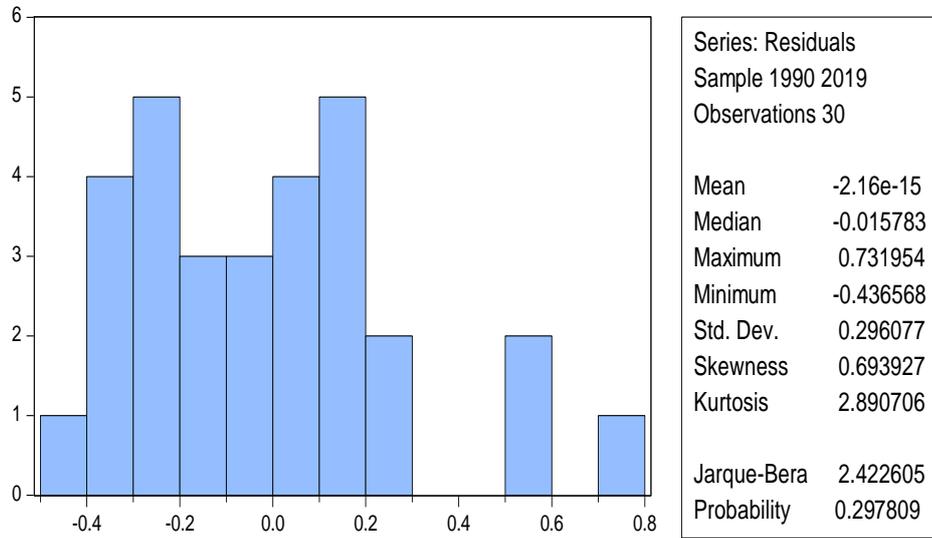
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.033563	1.073951	-0.031251	0.9756
LN <sub>X1</sub> <sup>2</sup>	0.005521	0.046164	0.119598	0.9070
LN <sub>X1</sub> *X <sub>2</sub>	6.78E-05	0.000152	0.445413	0.6647
LN <sub>X1</sub> *LN <sub>X3</sub>	-0.021152	0.030385	-0.696119	0.5008
LN <sub>X1</sub>	-0.008998	0.436538	-0.020612	0.9839
X <sub>2</sub> <sup>2</sup>	-3.66E-08	7.95E-08	-0.460403	0.6542
X <sub>2</sub> *LN <sub>X3</sub>	-3.99E-06	5.90E-05	-0.067552	0.9474
X <sub>2</sub>	-0.000375	0.000785	-0.477019	0.6427
LN <sub>X3</sub> <sup>2</sup>	0.007870	0.010816	0.727611	0.4821
LN <sub>X3</sub>	0.069768	0.169299	0.412101	0.6882

R-squared	0.202206	Mean dependent var	0.009503
Adjusted R-squared	-0.450534	S.D. dependent var	0.009897
S.E. of regression	0.011919	Akaike info criterion	-5.715539
Sum squared resid	0.001563	Schwarz criterion	-5.218147
Log likelihood	70.01316	Hannan-Quinn criter.	-5.607592
F-statistic	0.309781	Durbin-Watson stat	2.328783
Prob(F-statistic)	0.955392		

Lampiran 5

**Hasil Uji Normalitas**



Lampiran 6

**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors

Date: 11/15/20 Time: 14:52

Sample: 1990 2019

Included observations: 30

---

---

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.211428	378.2162	NA
LNx1	0.008014	581.9749	9.613723
X2	1.51E-08	45.92765	9.804292
LNx3	0.002349	87.99315	5.729283

---

---